

Better Policies Better Lives™



**Kajian Diagnostik**  
Pemetaan Lembaga Filantropi  
Pendukung Riset



# Kajian Diagnostik

# Pemetaan Lembaga Filantropi Pendukung Riset

Oleh:

**Hamid Abidin, Ninik Annisa, Nor Hiqmah, Tyas Wardhani Pusposari,  
Yul Amrozi, Zaenal Eko Putro**

**Maret 2017**



## **Kajian Diagnostik Pemetaan Lembaga Filantropi Pendukung Riset**

Pandangan penulis yang disampaikan dalam publikasi ini tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Australia, Pemerintah Indonesia, atau Knowledge Sector Initiative. Semua entitas tersebut tidak bertanggung jawab atas apa pun yang timbul akibat publikasi ini.



# Daftar Isi

Daftar Isi .....	iii
Singkatan dan Akronim.....	v
Ringkasan Eksekutif .....	vii
Rekomendasi Kebijakan.....	xi
<b>1. Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan Studi.....	3
C. Metode Studi .....	3
D. Cakupan Studi.....	7
E. Sangkalan .....	7
<b>2. Filantropi Partikelir Pendukung Riset .....</b>	<b>8</b>
A. Pertumbuhan Dunia Riset di Indonesia.....	8
B. Kontribusi Filantropi Pendukung Riset .....	11
C. Karakteristik Filantropi di Indonesia .....	13
<b>3. Peta dan Pola Dukungan Lembaga Filantropi Riset .....</b>	<b>16</b>
A. Profil Aktor Filantropi Pendukung Riset.....	16
B. Besaran, Bentuk, dan Sumber-sumber Dukungan .....	17
C. Isu/Tema Riset yang Didukung .....	19
D. Alasan dan Tujuan Mendukung atau Mendanai Riset.....	19
E. Lokasi atau Cakupan Wilayah Riset yang Didukung .....	21
F. Waktu Pengajuan Dukungan untuk Riset .....	21
G. Metode Penyaluran Dukungan Riset .....	22
H. Penerima Manfaat Dukungan Riset .....	23
I. Mekanisme Kerja Sama Dukungan Riset .....	24
J. Mitra yang Bisa Mengakses Dukungan Riset .....	25
K. Kriteria Mitra Riset.....	26
L. Pengambil Keputusan Dukungan Riset .....	26
M. Atmosfer dan Kiprah Dukungan Filantropi Riset.....	27

<b>4. Peta Lembaga Riset di Jabodetabek .....</b>	<b>30</b>
A. Profil Lembaga Riset.....	30
B. Kategori Riset.....	32
C. Dukungan dan Sumber Pendanaan.....	33
D. Metode Pengalangan dan Akses Dana Riset.....	35
E. Penerima Manfaat Riset .....	37
<b>5. Peluang dan Tantangan Filantropi Riset di Indonesia .....</b>	<b>39</b>
A. Peluang Dukungan Filantropi Riset di Indonesia .....	39
B. Tantangan dan Hambatan Filantropi Riset.....	44
C. Insentif dan Disinsentif Filantropi Riset .....	45
<b>6. Penutup .....</b>	<b>48</b>
A. Kesimpulan .....	48
B. Rekomendasi .....	49
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>51</b>



# Singkatan dan Akronim

AIPHSS	: Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening
ACT	: Aksi Cepat Tanggap
AIPJ	: Australia Indonesia Partnership for Justice
AmCham	: American Chamber of Commerce in Indonesia
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
ASPPUK	: Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil
AusAID	: The Australian Agency for International Development
BAZIS	: Badan Amil Zakat
BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional
BOPTN	: Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri
CEO	: Chief Executive Officer
CIA	: Central Intelligence Agency
CIPS	: Center for Indonesian Policy Studies
CSR	: Corporate Social Responsibility
DANIDA	: Danish International Development Agency
DFAT	: Department of Foreign Affairs and Trade
DFID	: The Department for International Development
Ditjen Dikti	: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi
ELSAM	: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
FF	: Ford Foundation
FGD	: Focus Group Discussion
FITRA	: Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran
HDI	: Human Development Index
IAEA	: The International Atomic Energy Agency
ICW	: Indonesia Corruption Watch
INFID	: International NGO Forum on Indonesian Development
IRAI	: Independent Research & Advisory Indonesia
KPA	: Konsorsium Pembaruan Agraria
LAZ	: Lembaga Amil Zakat
LAZISMU	: Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah
LIPS	: Lembaga Informasi Perburuhan Sedane
LPPM	: Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MIP	: Modern Indonesia Project
MRIN	: Mochtar Riady Institute for Nanotechnology
MSI	: Management Systems International

OPZ	: Organisasi Pengelola Zakat
PATTIRO	: Pusat Telaah dan Informasi Regional
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
PKPU	: Pos Keadilan Peduli Umat
PPIM UIN	: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri
PPM	: Pusat Pendidikan Manajemen
PSHK	: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
PT	: Perseroan Terbatas
PTPN	: Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara
SDM	: Sumber Daya Manusia
SINAS	: Sistem Inovasi Nasional
SMRC	: Saiful Mujani Research and Consulting
TNP2K	: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
TURC	: Trade Union Right Center
UI	: Universitas Indonesia
UNDP	: United Nations Development Programme
UNICEF	: The United Nations Children's Fund
USAID	: United States Agency for International Development
UU	: Undang-Undang
WWF	: World Wide Fund for Nature Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat
YAPPIKA	: Indonesia
YLKI	: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia



# Ringkasan Eksekutif

Francis Bacon, seorang filsuf, mengatakan bahwa “*knowledge is power*”. Ilmu pengetahuan adalah kekuasaan. Siapa menciptakan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan, maka akan menguasai dunia. Ilmu pengetahuan tidak turun dari langit, tapi dikembangkan manusia melalui serangkaian riset dan uji coba yang memakan waktu, tenaga, dan dana. Kenyataan itu bisa ditemukan dalam sejarah peradaban bangsa-bangsa. Jepang adalah contoh sukses negara yang miskin sumber daya alam, tapi menjadi kekuatan ekonomi dunia berkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka ciptakan.

Studi ini mengkaji potensi lembaga filantropi dan sektor swasta yang bisa mendanai kajian dan pengembangan riset, khususnya di lembaga-lembaga masyarakat sipil. Faktanya, sejumlah lembaga filantropi dan sektor swasta memiliki sumber daya yang dapat diakses. Sebagian dari mereka memiliki visi dan misi dalam mendukung riset—terlepas merupakan kebutuhan dan kepentingan internalnya atau bukan. Sebagian lembaga filantropi dan sektor swasta juga yang membutuhkan tenaga periset atau hasil riset yang dibutuhkan lembaga mereka. Sebab itu, studi ini bertujuan untuk melihat potensi tersebut, memetakan,

mengidentifikasi, mengeksplorasi, serta menganalisis lembaga atau aktor filantropi yang menyediakan sumber daya untuk mendukung riset, bagaimana mereka bekerja, serta tentang lembaga risetnya itu sendiri.

Kegiatan riset di Indonesia masih dianggap sebagai kewajiban negara melalui lembaga-lembaga resmi seperti perguruan tinggi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan lembaga penelitian lainnya. Riset yang didanai oleh pemerintah lebih besar peruntukannya bagi *civitas academica* di perguruan tinggi. Namun, kegiatan riset yang dibiayai negara tidak optimal karena kurangnya danadan penghargaan dari negara, serta pengelolaannya yang cenderung birokratis.

Studi ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak bisa berjalan sendirian dalam mengatasi kelangkaan dana riset. Sinergi dengan aktor dan lembaga nonpemerintah yang mempunyai kepentingan, sumber daya, dan dukungan finansial untuk melakukan riset sangat diperlukan. Sehingga, riset dan pengembangannya lebih maju dan berdampak positif bagi masyarakat, bangsa, dan perkembangan teknologi.

Dalam beberapa tahun terakhir, filantropi perusahaan semakin berkembang akibat pertumbuhan perusahaan dan munculnya

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Undang-undang ini mendorong sebuah etika bisnis dengan mewajibkan perusahaan mengalokasikan anggaran *corporate social responsibility* (CSR) dengan kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh perusahaan sendiri dan melalui pihak ketiga yakni lembaga-lembaga nonprofit.

Lembaga filantropi sangat berkepentingan terhadap riset sebagai landasan untuk perencanaan dan pengembangan program mereka. Riset dianggap sebagai kebutuhan penting sebelum program atau aktivitas sosial dijalankan lembaga filantropi. Dukungan lembaga filantropi terhadap riset dilakukan melalui tiga karakteristik lembaga, yaitu yayasan keluarga, filantropi perusahaan, dan organisasi intermediari.

Di Indonesia, potensi untuk melibatkan perusahaan dalam pendanaan riset sangat besar. Sepanjang 2014, belanja filantropi perusahaan mencapai Rp 2,42 triliun per bulan, yaitu 19,42 persen dari Rp 12,45 triliun, yang digunakan untuk pengembangan pendidikan dan riset. Jumlah dana untuk riset ini terus meningkat dari tahun sebelumnya. Mayoritas dukungan riset menasar pada isu sosial dan ekonomi (26 persen), sains dan teknologi (18 persen), kepentingan lembaga filantropi (16 persen), dan sisanya terkait dengan isu spesifik seperti kemanusiaan, budaya, lingkungan, kesehatan dan gizi, serta literasi keuangan. Isu yang menjadi obek riset masih cenderung mengikuti agenda riset dari lembaga *funding* atau pemberi dana dan disuaikan dengan kebutuhan lembaga filantropi atau perusahaan.

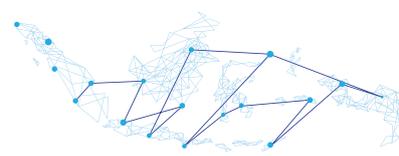
Studi ini mengungkapkan bahwa dukungan lembaga filantropi terhadap riset tidak hanya berupa dana, namun juga natura lainnya seperti laboratorium, tenaga ahli atau peneliti, atau peningkatan kapasitas peneliti melalui pelibatan dalam riset lembaga filantropi. Selain sebagai pemberi dana riset, sejumlah lembaga filantropi berperan sebagai pelaku riset itu sendiri. Mereka memiliki divisi R & D (*research*

*and development*), atau penelitian dan pengembangan (litbang), yang mengembangkan riset sendiri dengan memberikan kesempatan kepada pihak lain seperti perguruan tinggi, lembaga nonpemerintah, dan peneliti profesional, baik individu maupun lembaga, melakukan riset bersama. Mekanisme yang digunakan untuk mengumumkan pemberian pendanaan riset ini di antaranya adalah *call for proposal*, kompetisi, penunjukan langsung, *bidding/ tender*, dan *sponsorship*.

Studi ini menemukan bahwa motif lembaga filantropi pendukung riset lebih pada pemenuhan kebutuhan lembaga filantropi itu sendiri ketimbang dukungan program terhadap riset. Maka, menurut studi ini, penerima manfaat terbesar hasil riset adalah lembaga filantropi, bukan masyarakat. Lemahnya dampak riset pada masyarakat juga disebabkan penelitian belum mengarah pada kebutuhan publik. Karena itu, harus ada pendekatan baru agar lembaga filantropi lebih mendukung riset yang berkontribusi langsung pada masyarakat.

Studi ini menemukan empat sumber pendanaan lembaga riset. Pertama, dari donor internasional yang kebanyakan bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Kedua, dari perusahaan dengan pengaksesnya adalah lembaga riset profit, perguruan tinggi/ akademisi, dan LSM tertentu yang dianggap mempunyai kredibilitas dan reputasi. Ketiga, dari pemerintah dengan pengakses terbanyak adalah perguruan tinggi. Keempat, dari yayasan lokal seperti yayasan keluarga, yayasan keagamaan, dan yayasan sosial kemanusiaan lainnya. Studi ini mengungkapkan bahwa yayasan lokal membutuhkan mitra dalam melakukan riset untuk kebutuhan lembaganya.

Pemerintah harus menumbuhkan iklim riset nasional yang kondusif dengan cara melakukan deregulasi dan debirokratisasi terhadap aturan-aturan mengenai perguruan tinggi yang selama ini cenderung rumit dan memberatkan. Peraturan seharusnya memicu pertumbuhan



dan pengembangan riset dengan memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual serta kemudahan untuk mengukuhkan hak paten. Hal penting lainnya, memberikan penghargaan kepada lembaga filantropi pendukung riset sebagai insentif, seperti kemudahan perizinan, pengurangan atau penghapusan pajak, jasa akuntan publik, peningkatan kapasitas pengelolaan program, sinergi program, atau pengakuan kelembagaan. Ini agar lembaga filantropi antusias dalam mendukung pertumbuhan riset di Indonesia.

Lembaga filantropi yang bernaung dalam yayasan perusahaan dapat didorong untuk melakukan riset sebelum menerapkan program-programnya atau program CSR dari perusahaannya, atau program tanggung jawab perusahaan pada masyarakat di sekitar perusahaan, sehingga program tersebut tepat guna dan tepat sasaran. Di sisi lain, masyarakat sipil yang berperan sebagai salah satu pelaku riset, perlu dilibatkan untuk menerapkan riset yang dilakukan perusahaan. Selain

menciptakan kolaborasi yang lebih baik antarsektor, juga saling memperkuat proses dan hasil riset bersama tersebut. Sebab, masyarakat sipil merupakan pihak yang lebih mengetahui dan memahami hal-hal yang diperlukan dan menjadi bagian dari program yang akan dijalankan. Kendati demikian, khusus pada pengembangan riset, masyarakat sipil perlu mendapatkan dukungan dan pembaruan kapasitas agar lebih kuat.

Studi ini menunjukkan bahwa upaya memajukan riset di Indonesia harus dilakukan secara sinergis oleh tiga komponen strategis, yaitu pemerintah, lembaga filantropi, dan masyarakat sipil. Dengan demikian akan terjadi kolaborasi mutualisme dalam pengelolaan anggaran, prioritas isu, dan cakupan riset, pengelolaan sumber daya manusia, serta efektivitas dan dampak riset. Bahkan, kerja sama ini bisa dilakukan dalam merumuskan strategi yang kreatif dan inovatif untuk mencari dukungan sumber dana riset yang lain.

## AKAR PERSOALAN

- Minimnya dana riset dari pemerintah
- Tidak ada dukungan dana riset dari pemerintah untuk lembaga riset kepada sektor LSM
- Tidak ada informasi akses dana riset dari sumber selain pemerintah
- Dana riset lembaga filantropi lebih banyak digunakan untuk kepentingan lembaga itu sendiri
- Sejumlah lembaga filantropi belum memiliki anggaran khusus yang dialokasikan untuk mendukung riset
- Belum ada sinergi sektor swasta dan negara dalam skema pendanaan riset

## DISINSENTIF

- Belum ada regulasi yang mengatur pendanaan riset dari lembaga filantropi
- Tidak ada penghargaan untuk lembaga filantropi pendukung riset
- Belum ada rumusan insentif bagi lembaga filantropi pendukung riset

## Kontribusi lembaga filantropi terhadap riset

- Dana riset
- Kolaborasi program/kegiatan riset
- Kesempatan untuk menjadi konsultan dan pelaksana riset
- Asistensi teknis dan penyediaan pakar riset
- Laboratorium

## POTENSI LEMBAGA FILANTROPI PENDUKUNG RISET SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF

## Rekomendasi

- **Pemerintah**
  1. Regulasi untuk insentif riset dan perizinan yang memudahkan
  2. Regulasi untuk filantropi pendukung riset
  3. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan riset
- **Lembaga Filantropi**
  1. Menjadikan riset sebagai *evidence-based policy*
  2. Bersinergi dan mendukung LSM dan lembaga riset lain dalam pelaksanaan riset
  3. Transparansi dalam penganggaran riset dan program filantropi
  4. Publikasi riset yang telah dilakukan lembaga filantropi

## INSENTIF

- **Lembaga Filantropi**
  1. Keringanan pajak
  2. Kemudahan izin lembaga filantropi
  3. Dukungan program baik perizinan maupun insentif lainnya seperti pendanaan atau kolaborasi program
  4. Penghargaan berupa sertifikat/piagam dan rekomendasi lembaga
- **Lembaga Riset**
  1. Birokrasi perizinan yang memudahkan pelaksanaan riset
  2. Dukungan pendanaan riset, khususnya untuk LSM
  3. Penghargaan dalam bentuk sertifikasi/pengakuan akademis bagi riset LSM atau penghargaan lainnya

## Mekanisme lembaga filantropi mendukung riset

- *Call for proposal*
- Kompetisi
- Penunjukan langsung
- *Bidding/tender*
- *Sponsorship*



# Rekomendasi Kebijakan

Negara yang besar adalah negara yang kuat dalam riset. Studi ini memberikan pelajaran penting bahwa untuk membangun dunia riset membutuhkan dukungan dari banyak pihak, mulai dari pemerintah hingga sektor lain seperti lembaga filantropi. Selama ini ada kesan pemerintah memandang sebelah mata terhadap peran lembaga filantropi dalam mendukung riset. Pemerintah seharusnya memanfaatkan potensi filantropi riset dan mengoptimalkannya sebagai sumber daya alternatif untuk memajukan perkembangan ilmu pengetahuan.

Dalam kerangka kebijakan, pemerintah dapat melakukan tiga hal berikut:

**Pertama**, dalam jangka pendek, pemerintah memberikan insentif dengan cara membuat peraturan pemerintah atau peraturan menteri untuk memberikan penghargaan (*award*) bagi lembaga filantropi pendukung riset dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

**Kedua**, dalam jangka menengah, pemerintah membuat regulasi untuk memberikan penghargaan dalam bentuk insentif bagi lembaga filantropi pendukung riset. Insentif ini berupa keringanan pajak, rekomendasi usaha, hingga dukungan pendanaan untuk implementasi program lembaga tersebut.

**Ketiga**, dalam jangka panjang, perlu ada kepastian kebijakan mengenai peran lembaga filantropi. Kepastian kebijakan adalah payung hukum sekaligus fondasi yang dibutuhkan agar peran filantropi dalam mendukung riset lebih optimal. Pemerintah harus membuat Undang-

Undang Filantropi yang meneguhkan peran lembaga filantropi, khususnya untuk mendukung riset. UU Filantropi ini akan melindungi aktor yang terlibat dalam filantropi, mempermudah perizinan lembaga filantropi, memberikan insentif seperti *cost and benefit*, dan penghapusan pajak bantuan. UU Filantropi akan memberikan kepastian hukum dan aturan main kegiatan filantropi di Indonesia.

Dari pelajaran penting dan rekomendasi di atas, ada sejumlah studi lanjutan yang akan menjadi jalan untuk mengimplementasikan rekomendasi tersebut, yaitu:

- Studi potensi tren filantropi perusahaan  
Studi ini akan mengupas profil filantropi perusahaan, bidang program yang dikerjakan, kebijakan filantropi, besaran dana filantropi, dan mekanisme kerja sama dengan filantropi perusahaan. Studi ini memberikan rekomendasi strategi kerja sama filantropi perusahaan dengan sektor lain seperti LSM.
- Studi peran dan kontribusi lembaga filantropi di Indonesia  
Studi ini akan membahas aktor filantropi berikut profilnya, peran, besaran dana yang dikelola dan dikontribusikan, kekuatan dan potensi, serta tantangan yang dihadapi lembaga filantropi. Studi ini memotret dan mengukur peran lembaga filantropi di Indonesia, sehingga diharapkan ada kebijakan yang memberikan pengakuan dan payung hukum. Studi ini akan menjadi basis untuk merekomendasikan pentingnya UU Filantropi di Indonesia.





# Pendahuluan

## A. Latar Belakang

Kondisi riset di Indonesia masih memprihatinkan. Muhammad Nasir, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, mengungkapkan bahwa anggaran riset Indonesia hanya 0,09 persen dari PDB.<sup>1</sup> Alokasi ini jauh di bawah negara tetangga, seperti Malaysia yang menganggarkan 1 persen dari PDB, Singapura (2,5 persen), dan Korea Selatan (3,4 persen). Padahal, salah satu faktor dalam mengukur daya saing suatu bangsa adalah inovasi. Parameternya, jumlah paten yang didaftarkan tiap tahun. Sebab, jumlah anggaran penelitian dan pengembangan suatu negara linear dengan jumlah paten yang dihasilkan. Contohnya Jepang yang merupakan negara penghasil paten terbanyak pada 2008 dengan lebih dari 500 ribu aplikasi paten. Anggaran riset negeri itu mencapai US\$ 144 miliar. Di bawahnya ada Amerika Serikat dengan jumlah paten lebih dari 400 ribu aplikasi. Amerika mengalokasikan anggaran riset lebih dari US\$ 400 miliar. Sedangkan Indonesia hanya menganggarkan US\$ 0,72 miliar dan hanya menghasilkan 23 aplikasi paten. Angka ini bahkan jauh di bawah

Malaysia yang memproduksi 1.312 paten dengan anggaran riset US\$ 2,3 miliar dan Thailand (986 aplikasi paten, anggaran riset US\$ 1,46 miliar).<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi masih terlalu luas dalam merancang infrastruktur penelitian di Indonesia. Ini menyebabkan Indonesia tidak memiliki infrastruktur keuangan yang inovatif, sehingga tidak mampu mengalirkan dana dan insentif yang cukup untuk peneliti dan tidak bisa membuat penganggaran dana yang fleksibel untuk penelitian ilmiah.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemerintah Indonesia belum menjadikan riset sebagai basis dan visi pembangunan. Mestinya, riset menjadi pijakan dalam pengambilan kebijakan hingga pengembangan pengetahuan dan teknologi. Kealpaan pada peran penting dunia penelitian inilah yang membuat Indonesia tertinggal jauh dari negara lain. Menurut World Economic Forum, skor kualitas lembaga riset Indonesia pada 2015 adalah 4,8 (skala 1-7), sehingga menempati urutan ke-41 dari 144 negara. Posisi ini di

1 CNN Indonesia, 6 Agustus 2015.

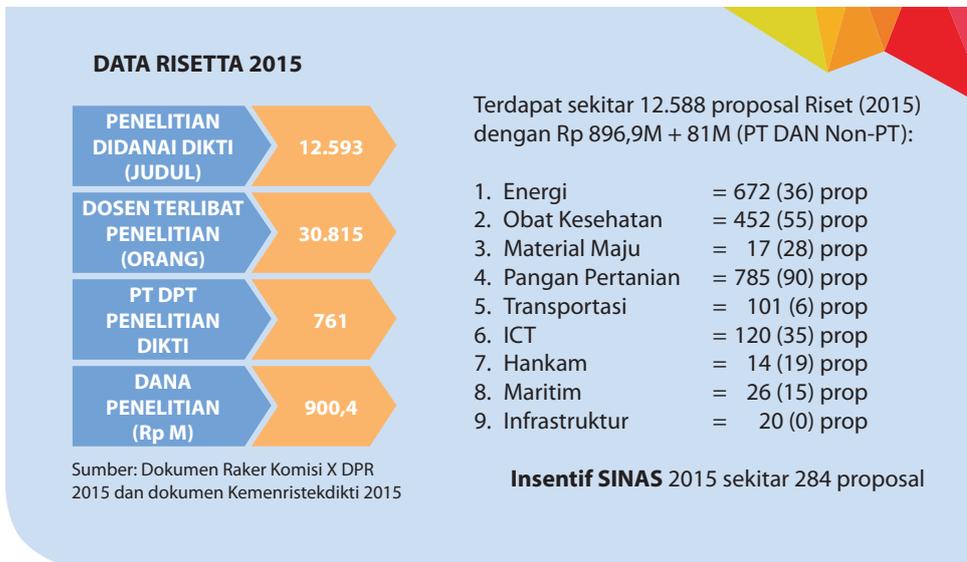
2 LIPI, 30 Juni 2012.

bawah negara ASEAN lainnya seperti Singapura (skor 5,6 di urutan ke-11), dan Malaysia (skor 5,2 di urutan ke-20).<sup>3</sup>

Riset yang didanai oleh pemerintah lebih diperuntukkan bagi warga perguruan tinggi. Topiknya pun berkuat di sektor energi, pangan, infrastruktur, dan pengembangan teknologi lainnya. Riset dengan tema sosial belum menjadi prioritas. Data Insentif Riset SINAS (Sistem Inovasi Nasional) Kemenristekdikti 2015 menyebutkan ada 284 proposal riset dengan total dana Rp 977,9 miliar untuk perguruan tinggi dan nonperguruan tinggi, tapi belum mengangkat isu-isu sosial. Potret riset di Indonesia pada 2015 tergambar dalam data berikut:

bisa diakses melalui filantropi dan kebutuhan riset lembaga filantropi itu sendiri.

Salah satu pelaku filantropi yang belakangan cukup aktif adalah perusahaan—kemudian disebut sebagai filantropi perusahaan. Filantropi perusahaan atau kedermawanan perusahaan tumbuh seiring dengan berkembangnya pemahaman terhadap konsep dan praktik CSR di Indonesia terlepas dari pertanyaan: apakah CSR berarti filantropi perusahaan? Atau, apakah CSR bersifat kewajiban atau kesukarelaan? Dan seterusnya. Perkembangan aktivitas filantropi perusahaan juga didukung oleh kemunculan konsep *Triple Bottom Line of Sustainability* (manusia, planet, dan laba). Singkatnya, perkembangan

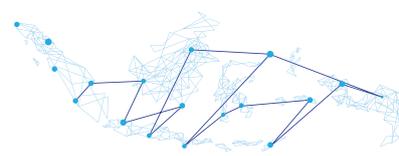


Di tengah keterbatasan dana riset dari pemerintah, sebenarnya ada sumber daya alternatif dari filantropi yang dilakukan oleh perseorangan, komunitas, lembaga amal, dan perusahaan. Mereka memiliki dana dan kebutuhan untuk melakukan riset guna menunjang kegiatannya. Tapi, keahlian mereka dalam melakukan riset terbatas. Di sinilah titik temu antara lembaga filantropi dan pelaksana riset, baik itu lembaga maupun individu, untuk bersinergi dalam mengembangkan program riset di Indonesia. Titik ini juga mempertemukan kebutuhan lembaga riset terhadap sumber daya yang

kegiatan filantropi perusahaan di Indonesia menunjukkan tren positif dan nilainya meningkat tiap tahun.

Penelitian Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC) dan Dompot Dhuafa pada 2015 mencatat jumlah sumbangan dari perusahaan sepanjang 2014 mencapai Rp 12,45 triliun, atau sekitar Rp 1,04 triliun per bulan. Sumbangan tersebut disalurkan oleh 400 perusahaan untuk mendukung 1.416 program. Jumlah sumbangan itu meningkat dari tahun sebelumnya (2013), Rp 8,6 triliun, atau naik hampir dua kali lipat. Penelitian itu juga memperlihatkan bahwa sumbangan perusahaan untuk pendidikan dan riset

<sup>3</sup> Republika, 28 Desember 2015.



jumlahnya cukup besar, yaitu 20,84 persen (2013) dan 19,42 persen (2014). Angka itu hampir setara Rp 2,42 triliun. Nilai sumbangan perusahaan dalam bidang pendidikan dan riset berada di peringkat kedua setelah sumbangan terhadap program penyantunan dan pelayanan sosial. Sayangnya, besarnya dana untuk pendidikan dan riset pada penelitian ini masih belum tergambar dalam hasil dan dampaknya, terutama untuk menggairahkan kegiatan riset di kalangan peneliti di lembaga masyarakat sipil.

Selain dana filantropi perusahaan, sumber daya yang bisa diakses untuk pendanaan program riset di antaranya organisasi pengelola zakat, yayasan keluarga, yayasan perusahaan, yayasan independen berbasis keagamaan dan LSM yang bekerja sebagai pemberi dana atau intermediari (perantara). Namun, informasi mengenai sumber pendanaan alternatif ini serta mekanisme pengajuannya tidak diketahui oleh lembaga pelaksana riset, sehingga belum terjalin kerja sama untuk mendukung kegiatan riset.

## B. Maksud dan Tujuan Studi

Studi ini mengkaji potensi lembaga filantropi dan sektor swasta yang bisa mendanai kajian dan pengembangan riset, khususnya di lembaga masyarakat sipil. Studi ini juga didorong oleh pengalaman PIRAC dan LSM sejenis dalam mencari dukungan dana penelitian. Diskusi kelompok terarah dengan tema “Sub-Working Group Filantropi dan Sektor Swasta” yang diselenggarakan oleh KSI pada 4 November 2015 membahas pengalaman sulitnya lembaga penelitian lokal mencari sumber daya. Padahal, lembaga filantropi dan sektor swasta memiliki sumber daya yang dapat diakses, memiliki visi dan misi dalam mendukung riset, sekaligus membutuhkan jasa riset sesuai dengan bidang pekerjaan mereka.

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi, memetakan, dan menganalisis lembaga atau aktor filantropi yang menyediakan sumber daya untuk mendukung riset, lembaga yang

aktif melakukan riset, dan bagaimana mereka bekerja.

Studi ini mengeksplorasi secara rinci:

1. Peta lembaga pendukung riset, mulai dari lembaga filantropi, LSM, hingga perusahaan. Data ini berupa profil, sumber dana, kriteria pelaksana riset, aksesibilitas, karakteristik, sektor, ketersediaan sumber daya, motif, isu/tema penelitian, besaran dana, dan periodenya.
2. Profil lembaga dan produk penelitiannya menyangkut tema, kepentingan pemberi dana, mekanisme kerja, dan manfaat penelitian terhadap lembaga filantropi dan masyarakat.
3. Faktor pendukung dan penghambat lembaga filantropi untuk memberikan dukungan berupa insentif dan disinsentif.

## C. Metode Studi

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*mix method*) dan memadukan pendekatan kuantitatif (survei) dan kualitatif (wawancara mendalam/*indepth interview* dan FGD). Tujuannya, untuk memperoleh gambaran holistik mengenai tema dan masalah penelitian yang diangkat. Penjelasan tentang penggunaan metode campuran tersebut dipaparkan di bawah ini.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam studi ini meliputi:

### 1. Kajian dokumen dan pustaka

Studi pustaka merupakan pengumpulan data dan informasi dari dokumen berupa profil, laporan tahunan, publikasi kegiatan lembaga, dan hasil studi yang terkait dengan lembaga riset dan lembaga pendukung riset. Studi dilakukan dengan cara mengkaji dan membuat ulasan singkat isi dokumen cetak dan digital. Hasilnya adalah kajian terhadap pertumbuhan dunia riset di Indonesia, termasuk bagaimana kontribusi lembaga filantropi dalam mendukung riset.

## 2. Survei

Survei dengan menggunakan kuesioner dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang bersifat kuantitatif. Responden yang dipilih merupakan perwakilan dari lembaga riset dan lembaga filantropi pendukung riset. Terdapat sejumlah kategori dalam survei ini, yaitu:

Lembaga Riset	Lembaga Filantropi Pendukung Riset
Perguruan tinggi	Filantropi perusahaan
Profit	Organisasi intermediari
LSM	Yayasan keluarga

Pencarian data responden lembaga filantropi pendukung riset dilakukan dengan penelusuran *online* di situs mereka dan mengecek *database* lembaga filantropi yang dimiliki PIRAC. Lembaga filantropi yang terkumpul mencapai 150 organisasi. Dari data itu dibuat daftar dengan kategori di atas. Berikut rinciannya:

1. Filantropi perusahaan: 51 lembaga
2. Yayasan keluarga: 26 lembaga
3. Organisasi intermediari: 73 lembaga

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibagi untuk diambil sebagai sampel studi. Pertimbangan populasinya, mereka teridentifikasi sebagai lembaga filantropi pendukung riset dan berlokasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dari total 150 responden, jumlah lembaga yang

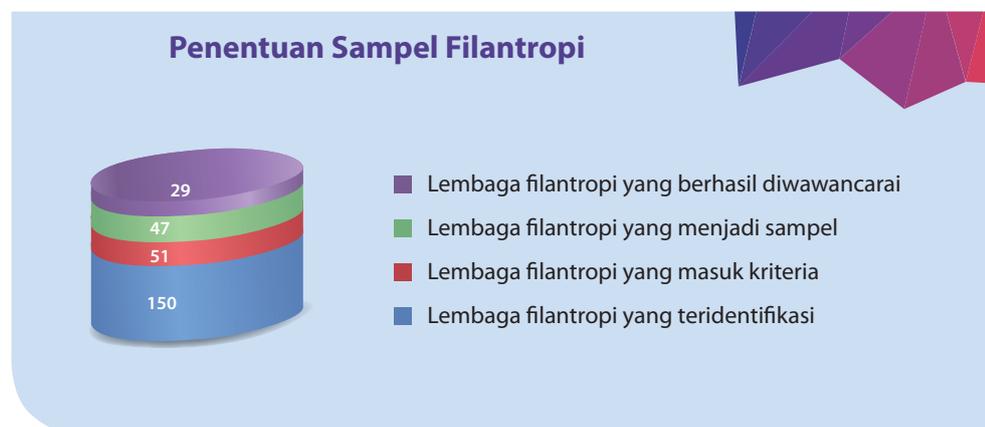
masuk ke dalam dua kriteria di atas ada 51.

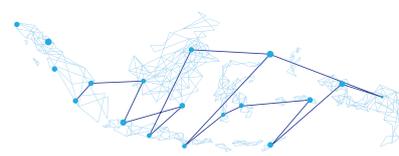
Pemilihan sampel dan penentuan responden dilakukan secara *purposive*, yakni teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu. Dalam riset ini, interval kepercayaan yang digunakan sebesar 4 dan 47 persen, sedangkan tingkat kepercayaannya 95 persen. Dengan interval kepercayaan sebesar 4 dan 47 persen dari sampel, dapat dipastikan bahwa seluruh pertanyaan telah diajukan kepada seluruh populasi relevan, antara 43 persen (47-4) dan 51 persen (47+4), dan telah menjawab dengan benar.

Tingkat kepercayaan menjelaskan tingkat keyakinan atas populasi survei ini. Dalam survei ini diperoleh tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Selanjutnya, dengan menggunakan perhitungan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dan interval kepercayaan sebesar 4, sampel yang diambil sebanyak 47 responden. Dari 47 responden terpilih, yang dapat diwawancarai hanya 29, sebab 12 lembaga menolak diwawancarai dan 6 lembaga lainnya belum berhasil diwawancarai. Alasannya, sampai batas waktu studi ini belum dipastikan siapa yang akan diwawancarai dan kapan waktu wawancaranya.

Berikut ini daftar lembaga yang menjadi responden terpilih dan berhasil diwawancarai:





### Lembaga Filantropi Berhasil Diwawancarai

1. Yayasan Unilever Indonesia	16. PKPU
2. Eka Tjipta Foundation	17. Anwar Muhammad Foundation
3. Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia	18. The Habibie Center
4. Dompok Dhuafa	19. Yayasan Danamon Peduli
5. CSR PT Adaro Energy Tbk.	20. PT Indofood Sukses Makmur
6. Tanoto Foundation	21. CSR Aqua Danone
7. Pertamina Foundation	22. BAZNAS
8. KEHATI	23. YAPPIKA
9. CT Arsa Foundation	24. ACT (Aksi Cepat Tanggap)
10. HDI Foundation	25. Yayasan Baitul Hikmah El Nusa
11. Rumah Zakat	26. Citi Pekka Indonesia
12. LAZISMU	27. SEAMOLEC
13. Indonesia Danone Institute	28. Yayasan Tahija
14. BAZIS DKI	29. Indonesia Business Links
15. Baitul Maal Hidayatullah	

Pencarian data responden lembaga riset dilakukan menelusuri laman situs lembaga-lembaga riset dan menggali *database* lembaga riset yang dimiliki PIRAC. Ada 67 lembaga riset yang berhasil dikumpulkan. Dari data itu, dibuat daftar sesuai dengan kategori yang di atas, yaitu:

1. Profit: 30 lembaga
2. Perguruan tinggi: 20 lembaga
3. LSM: 17 lembaga

Setelah data lembaga terkumpul, lokasi penelitian ditentukan dengan berkonsentrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Selain itu, ada kriteria tambahan untuk masing-masing kategori, yaitu:

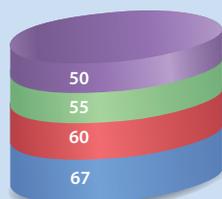
1. Profit: lembaga dengan cakupan wilayah kerja nasional dan menggunakan sumber daya nasional (bukan

perusahaan riset global/multinasional).

2. LSM: lembaga yang melakukan riset secara rutin mengenai isu yang selaras dengan agenda kerja mereka.
3. Perguruan tinggi: lembaga yang melakukan riset secara rutin dengan persebaran bidang riset.

Dari total lembaga riset yang terdata, yaitu 67 lembaga, jumlah lembaga yang masuk ke dalam kriteria pertimbangan mengerucut menjadi 60. Selanjutnya, dengan menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dan interval kepercayaan sebesar 4, maka sampel yang diambil berjumlah 55. Dari 55 responden terpilih, sebanyak 50 di antaranya dapat diwawancarai. Sedangkan 5 lembaga lainnya menolak untuk disigi.

### Penentuan Sampel Riset



- Lembaga filantropi yang berhasil diwawancarai
- Lembaga filantropi yang menjadi sampel
- Lembaga filantropi yang masuk kriteria
- Lembaga filantropi yang teridentifikasi

## Lembaga Riset Berhasil Diwawancarai

1. Women Research Institute	26. LPPM UKI
2. LPPM Universitas Pelita Harapan	27. LPPM IPB
3. PSHK	28. LPPM UMJ
4. Bina Swadaya	29. YLKI
5. PPIM UIN	30. INFID
6. Wahid Foundation	31. ICW
7. FITRA	32. CORE Indonesia
8. LPPM Universitas Matana	33. SMERU Research Institute
9. Maarif Institute	34. Yayasan Jurnal Perempuan
10. LPPM Universitas Paramadina	35. IRAI
11. Lab Sosiologi Universitas Indonesia	36. ELSAM
12. LPPM Universitas Moestopo	37. LSPP
13. Lemlit UHAMKA	38. Indobarometer
14. LP3ES	39. ASPPUK
15. LPPM Universitas Atmajaya	40. Sigma Research Indonesia
16. Lab Fisika Medis Universitas Indonesia	41. Mars Indonesia
17. LPPM Universitas Mercubuana	42. LPPM UNAS
18. Cirus Surveyor	43. Mochtar Riyadi Institute for Nanotechnology
19. KPA	44. TURC
20. Lemlit UNJ	45. Institute for Strategic Indonesia
21. PATTIRO	46. PPM Manajemen
22. LPPM Universitas Trilogi	47. Lembaga Pers Dr. Soetomo
23. Indikator Politik	48. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat UI
24. CIPS	49. Charta Politika
25. SMRC	50. SEDANE LIPS

### 3. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali pandangan lembaga riset dan lembaga filantropi pendukung riset. Dengan melihat kondisi terkini, pada lembaga riset digali peluang dan tantangan yang dihadapi. Sedangkan wawancara dengan lembaga filantropi pendukung riset mengorek tingkat dukungan mereka terhadap riset, besaran dana, pola dan skema pendanaan, analisis mengenai insentif dan disinsentif, biaya dan manfaat, lingkungan pendukung, dan rekomendasi bagi sektor pengetahuan. Para pemangku kepentingan pun ditanya mengenai peran mereka dalam menghubungkan filantropi dengan sektor pengetahuan di Indonesia.

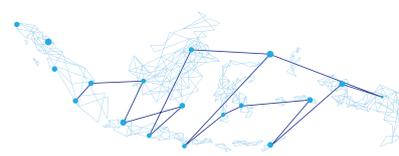
Wawancara mendalam ini melengkapi dan memperkaya temuan dari survei sehingga didapatkan gambaran lebih detail mengenai kesiapan lembaga. Wawancara dilakukan dengan pimpinan lembaga filantropi tersebut atau yang mewakili.

Ada sembilan lembaga riset yang

diwawancara secara mendalam. Mereka adalah SMRC, PPIM UIN Jakarta, SMERU, IRAI, YLKI, Laboratorium Fisika UI, Women Research Indonesia, Mochtar Riyadi Institute for Nanotechnology, dan PSHK. Demikian juga ada tujuh lembaga filantropi yang diwawancara secara mendalam, yakni KEHATI, Dompot Dhuafa, PT Indofood Sukses Makmur, Citi Peka Indonesia, YAPPIKA, PT Adaro Energy, dan Tahija Foundation. Masing-masing lembaga mewakili kategori survei.

### 4. Diskusi kelompok terfokus

Diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion/FGD*) dimaksudkan untuk menggali tambahan informasi dan memeriksa ulang isu-isu yang diteliti, yang datanya tidak cukup diperoleh melalui wawancara dan survei. Hal ini juga dilakukan untuk memperdalam dan meminta klarifikasi pemangku kepentingan filantropi. FGD dilaksanakan dua kali dengan memisahkan sesi lembaga riset



dan lembaga filantropi pendukung riset. Total ada 20 peserta yang berasal dari 18 lembaga, yaitu:

- Sesi 1, kelompok lembaga riset: Lembaga Pers Dr. Soetomo, Trade Union Rights Center, LPPM Universitas Nasional, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat UI, PPM Manajemen, Center for Policy Studies (CIPS), Institute for Strategic Initiatives, Policy Research Network, dan Sedane LIPS.
- Sesi 2, kelompok lembaga filantropi: ACT, Yappika, Anwar Muhammad Foundation, Indonesia Business Link, Yayasan Kehati, PT Adaro Energy, Dompot Dhuafa, Yayasan Institute Danone Indonesia, dan BPZIS Mandiri.

#### D. Cakupan Studi

Studi ini menghimpun data secara nasional menurut wilayah yang disusun secara proporsional. Pembagian wilayah studi berdasarkan jumlah lembaga riset, lembaga pendukung riset di wilayah tersebut, dan riset yang dihasilkan. Dalam studi ini, wilayah riset hanya terbatas pada lembaga-lembaga yang berkantor di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

#### E. Sangkalan

Studi ini tidak menggunakan metode sensus dalam pengumpulan data lembaga riset dan lembaga filantropi pendukung riset di seluruh Indonesia. Studi ini hanya berkonsentrasi pada lembaga yang tersebar di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Studi ini menggunakan data primer, melalui wawancara mendalam dan survei dan data sekunder, seperti studi pustaka, direktori, dan dokumen lain yang terkait.

Survei terhadap lembaga menitikberatkan

pada pertimbangan dukungan terhadap riset. Wawancara mendalam dilakukan dengan lembaga yang merepresentasikan cakupan isu dan masing-masing kategori subjek riset. Selanjutnya, temuan hasil survei dan wawancara mendalam dielaborasi dalam forum FGD. Studi ini dibatasi dengan metodologi yang telah dipilih. Persoalan kesalahan dalam mengutip, merekam, menginterpretasikan hasil wawancara dan penelusuran data, sepenuhnya merupakan tanggung jawab peneliti.

Atas pemilihan metode studi tersebut, ada sejumlah keterbatasan dalam melihat hasil studi ini. Di antaranya:

1. Tidak semua sampel lembaga filantropi dan lembaga riset menjadi responden dalam studi ini. Keterbatasan waktu, kebijakan internal seperti kerahasiaan dan kewenangan untuk mengisi kuesioner menjadi kendala dalam pengumpulan data. Meski demikian, rasio pengambilan sampel masih dalam batas akurat sebagaimana dijelaskan dalam metodologi di atas.
2. Belum banyak penelitian tentang filantropi riset, sehingga data yang disajikan dalam kajian pustaka masih terbatas.
3. Mengingat ini adalah studi diagnostik, studi ini hanya mencakup potret kondisi riset dan dukungannya dari filantropi pendukung riset, kendala dan tantangan dan potensi dukungan riset dari lembaga filantropi.
4. Sejumlah lembaga filantropi tidak semata-mata berfokus pada riset. Sering kali riset tersebut untuk mendukung pelaksanaan program atau kegiatan. Kepentingan riset sering bercampur dengan kepentingan perusahaan atau lembaga. Sehingga, pengetahuan tentang dukungan filantropi untuk “riset murni” belum tergambar secara jelas.



# Filantropi Partikelir Pendukung Riset

Tingkat literasi orang Indonesia belum seperti di negara maju. Literasi, atau budaya baca-tulis, yang rendah berakibat pada miskinnya inovasi dan kreativitas warganya. Maka, Indonesia cenderung menjadi pasar bagi negara lain ketimbang menjadi produsen.

Singkatnya, tinggi atau rendahnya budaya baca-tulis masyarakat berdampak pada marak atau sepihnya kerja-kerja riset. Pekerjaan di bidang ini membutuhkan keahlian khusus, seperti penguasaan masalah dan analisis, pemahaman teori, serta ketelitian menerapkan metode penelitian. Sebab itu, peran pemangku kebijakan, terutama pemerintah, sangat penting dalam menciptakan budaya ilmiah di masyarakat.

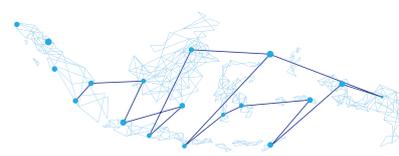
## A. Pertumbuhan Dunia Riset di Indonesia

Dunia riset digeluti peneliti Indonesia setelah kemerdekaan. Kegiatan ini muncul dan berkembang berkat uluran tangan akademisi luar negeri. Bahkan, jika dirunut jauh ke belakang, riset-riset tentang Indonesia terlebih dahulu dilakukan ilmuwan Eropa, terutama Belanda. Penelitian tentang budaya, ekonomi, hingga pranata sosial di masyarakat dirintis ilmuwan Belanda seperti De Graff di bidang sosial keagamaan, Van Vollenhoven

(hukum adat), dan Snouck Hurgronje (keagamaan). Saat itu, riset tersebut belum melibatkan ilmuwan nusantara.

Setelah Indonesia merdeka, seiring dengan berdirinya berbagai perguruan tinggi, peneliti dalam negeri mulai unjuk gigi. Salah satunya berkat dukungan Rockefeller dan Ford Foundation (Anderson 2002). Lembaga donor tersebut cukup lama menjejalkan kakinya di Indonesia—sejak akhir 1960-an melalui program Cornell Modern Indonesia Project (MIP) yang digawangi George McT. Kahin, profesor dari Cornell University yang mengoordinasi program Asia Tenggara. Sosok Kahin dan lembaga donor yang berbasis di Amerika tersebut begitu familiar di kalangan akademisi, khususnya bidang humaniora, di Tanah Air.

Kedekatan Kahin dengan sejumlah intelektual dari Universitas Indonesia kala itu, seperti Djokosutono dari Fakultas Hukum dan Sumitro dari Fakultas Ekonomi, merupakan jalan yang memuluskan implementasi rencana Ford Foundation (FF), yang sebelumnya telah disetujui badan intelijen Amerika Serikat, CIA. Proyek riset berawal dari agenda untuk meneliti bahaya komunisme bagi masa depan Indonesia—tanpa menyebutkan bahwa riset tersebut didukung FF. Sampai pada situasi



tertentu, Kahin menyimpulkan bahwa untuk mengetahui dampak komunisme di Indonesia, perlu riset terhadap seluruh aspek politik Indonesia. Maka, disusunlah delapan tema utama riset yang akan dilakukan, yaitu pemerintahan pusat, parlemen, pemerintahan daerah, organisasi buruh serta pemuda, partai-partai Islam, partai komunis, partai sosialis, dan komunitas Cina di Indonesia (Parmar 2012).

Atas masukan dari pejabat FF, Kahin kemudian mengalokasikan sebagian besar riset lapangan kepada ilmuwan Indonesia— untuk menghilangkan kecurigaan jika dilakukan ilmuwan Barat. Kebijakan itu setidaknya berdampak pada dua hal, yaitu turut mengembangkan kemampuan dan pengalaman ilmuwan sosial, dan memperkuat komunitas ilmuwan sosial di Indonesia. Dampak selanjutnya politis: ikut mengurangi kesenjangan antara elite berpendidikan Barat dan massa petani. Melancarkan program tersebut, Cornell Modern Indonesia Project menggandeng UI dengan dukungan finansial dari FF. Program riset itu dibaca sebagai penelitian secara mendalam tentang kekuatan Indonesia (Parmar 2012).

Selanjutnya, FF bermitra bukan hanya dengan kalangan dari perguruan tinggi, tapi juga dengan lembaga-lembaga nonprofit. Tema-temanya tidak jauh berubah sejak dukungan FF terhadap Kahin. Hanya, belakangan seiring dengan perkembangan isu global seperti kesetaraan gender, hak minoritas, hak budaya, hingga tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dukungan riset FF juga mulai menasar isu-isu tersebut. Keterlibatan peneliti asing dalam proyek riset yang didanai FF lambat laun berkurang. Riset lebih banyak dijalankan oleh peneliti dalam negeri bersamaan dengan makin meningkatnya kemampuan riset mereka. Selain akademisi, peneliti yang risetnya dibiayai FF biasanya juga berasal dari kalangan LSM yang melakukan pendampingan masyarakat.

Lembaga donor lain pun serupa FF dalam

mendukung isu-isu tadi. The Asia Foundation misalnya, menggandeng mitra lokal untuk mengimplementasikan program seputar penguatan *good governance*, penanggulangan kemiskinan, hingga penguatan demokrasi di kalangan kaum muslim. Di luar donor internasional, lembaga bantuan pemerintah luar negeri seperti USAID (Amerika Serikat), Ausaid (Australia), DFID (Inggris), dan lembaga yang melekat pada PBB seperti UNDP, juga mendukung penguatan masyarakat sipil di Indonesia, termasuk mendukung riset. Pendanaan riset pun datang dari lembaga donor domestik seperti Kemitraan, Indonesian Biodiversity Foundation (IBF), serta Yayasan TIFA (Anand 2014). Belakangan, pemerintah luar negeri melalui kedutaan mereka di Jakarta, seperti Kedutaan Denmark dan Kedutaan Selandia Baru, mengucurkan dana riset meski masih sporadis dan insidental.

Bila dukungan dari luar negeri untuk aktivitas riset demikian nyata, bagaimana sebenarnya dukungan riset dari dalam negeri sendiri, khususnya dari pemerintah? Selama ini, skema pendanaan riset di Indonesia masih mengharapakan uluran tangan pemerintah. Terutama, riset dosen di perguruan tinggi. Skema penelitian yang ada masih menasar kalangan pendidik. Setiap tahun, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi (Dirjen Dikti) menggulirkan skema hibah riset serta pengabdian kepada masyarakat. Pendanaannya berasal dari biaya operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Bidang tersebut dikelola oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.<sup>4</sup> Walaupun perhatian pemerintah kian meningkat, yang ditandai dengan naiknya jumlah anggaran riset, namun sarana penunjang untuk membentuk iklim riset belum optimal.

Selama ini masalah utama yang mengganjal skema riset di perguruan tinggi yang didukung

<sup>4</sup> Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi X Tahun 2016 halaman i.

pemerintah, antara lain, terlalu birokratis dalam prosedur (Rakhmani dan Siregar 2016). Ada juga anggapan bahwa SDM pemerintah belum mumpuni dalam memahami substansi riset. Kedua hal tersebut bukan tidak mungkin turut menyumbang fakta rendahnya minat riset di dalam negeri. Penyebab lainnya, peluang riset bagi peneliti yang tak berprofesi sebagai dosen di perguruan tinggi tak seterbuka bagi dosen. Menyusutnya dukungan finansial dari lembaga-lembaga donor sejak pengawasan lembaga donor luar negeri makin ketat—setidaknya dalam satu dekade terakhir ini—merupakan persoalan tersendiri.

Rakhmani dan Siregar mengatakan bahwa rezim Orde Baru yang otoriter meninggalkan tapak negatif terhadap pelembagaan produksi pengetahuan, khususnya dalam bidang riset dan publikasi. Mengutip Evers (2003), cukup beralasan bahwa Indonesia sangat ketinggalan dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara dalam hal publikasi internasional, khususnya dalam bidang ilmu sosial dan humaniora. Apalagi, kebijakan riset yang lebih mengunggulkan ilmu alam (*natural science*) dan ilmu terapan (*applied science*) menyebabkan atmosfer kekritisian berpikir, yang merupakan kekhasan ilmu sosial, menjadi stagnan.

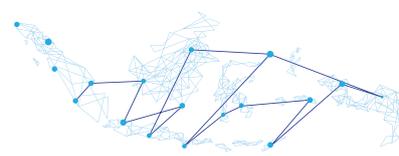
Hadiz dan Dhakidae (2005) serta Guggenheim (2012) melihat problem terletak di level struktural yang melekat pada tubuh perguruan tinggi dan lembaga-lembaga riset. Selama ini riset yang dilakukan belum terbebas dari masukan teknokratis untuk kepentingan pemerintah. Situasi demikian, menurut Guggenheim (2012), disebut sebagai “pemangkasan otonomi dan kebebasan akademik” (*curtailed autonomy and academic freedom*) dan turut andil dalam terjadinya penindasan sistematis atas pikiran kritis. Konsekuensinya, tidak ada satu pun dari sekitar 3.000 lebih lembaga yang meliputi perguruan tinggi dan lembaga riset, yang mempunyai reputasi internasional. Menurut data AusAID pada 2013, perguruan tinggi Indonesia paling bagus hanya menduduki

urutan ke-201 universitas terbaik dunia, mengacu pada peringkat Times Higher Education (THE) World University Ranking. Pada 2014, posisi ini menurun ke peringkat 310 (Rakhmani dan Siregar 2016).

Menurut Rakhmani dan Siregar, jumlah dokumen ilmiah Indonesia yang terpublikasi selama 1996 hingga 2010 hanya 13.047, jauh di bawah Thailand, Malaysia dan Singapura. Bahkan, menurut Guggenheim (2012), masih di bawah negara-negara dengan PDB serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lebih rendah seperti Bangladesh, Kenya, dan Nigeria. Kondisi lebih buruk dialami ilmu sosial dan humaniora. Hampir 90 persen artikel yang terpublikasi tentang Indonesia ditulis oleh orang yang tinggal di luar Indonesia. Ini yang, menurut Reid (2011), menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara paling tidak efektif dalam menjelaskan dirinya sendiri di mata dunia.

Walaupun pemerintah dan lembaga donor internasional telah berinvestasi dalam pengembangan kapasitas seperti menyediakan beasiswa bagi pelajar Indonesia untuk belajar di luar negeri, hal tersebut tidak cukup untuk membilas kebijakan masa lalu. Berbagai riset yang didukung lembaga donor pun belum cukup menambah angka publikasi Indonesia karena riset yang dilakukan peneliti dari kalangan LSM tidak mewajibkan publikasi. Selain itu, dukungan riset tersebut tak mendorong hasil akhir penelitian terbit dalam jurnal internasional. Sehingga, rendahnya angka publikasi bukan kelemahan peneliti semata, melainkan juga kesalahan lembaga donor yang tak mewajibkan publikasi internasional.

Kebijakan pemerintah pun berubah seiring dengan bergulirnya demokrasi, yang ditandai dengan perubahan iklim riset dan tumbuhnya kesadaran terhadap pentingnya publikasi internasional. Perubahan ini paling tampak terjadi di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang bertanggung jawab dalam mengelola perguruan tinggi di Indonesia. Direktorat ini mengalokasikan dana signifikan untuk riset



dan pengabdian masyarakat. Pada 2008, direktorat mengalokasikan Rp 150 miliar untuk riset.<sup>5</sup> Lima tahun kemudian, pada 2013, anggarannya meningkat drastis menjadi Rp 2,7 triliun, yang mencerminkan adanya peningkatan total anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan dalam APBN (Rakhmani dan Siregar 2016).

Perhatian dan pendanaan pemerintah untuk mendukung riset dan publikasi ilmiah kian meningkat dengan keluarnya kebijakan teknis. Dukungan pendanaan untuk riset dinyatakan secara tegas dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menyatakan bahwa perguruan tinggi mendapatkan bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) dengan 30 persen sekurang-kurangnya dialokasikan untuk kegiatan penelitian.<sup>6</sup> Klausul 30 persen anggaran untuk riset ini terus dibicarakan di perguruan tinggi, mengingat perguruan tinggi belum sepenuhnya berorientasi pada dunia penelitian.

Walaupun anggaran telah dinaikkan dan pemerintahan Presiden Joko Widodo menggabungkan Dikti dengan Kementerian Riset dan Teknologi, Rakhmani dan Siregar belum melihat reorganisasi ini berdampak signifikan terhadap perubahan fundamental pada isu pemikiran kritis dan publikasi internasional (Rakhmani dan Siregar 2016). Barangkali dampaknya akan terlihat dalam beberapa tahun lagi. Saat ini publikasi jurnal internasional telah dijadikan syarat untuk naik tingkat dan golongan yang lebih tinggi, terutama pada jabatan fungsional di perguruan tinggi. Hal ini diharapkan akan merangsang kalangan akademik mengejar publikasi ilmiah berskala internasional.

Terobosan demi terobosan yang dibuat oleh pembuat kebijakan seperti di atas patut dilihat sebagai titik terang, meski masih terbatas pada kalangan peneliti di bawah koordinasi Kemenristekdikti. Masalah struktural yang

menghalangi peneliti Indonesia untuk mengembangkan budaya akademik harus segera dibereskan. Sulit disangkal bahwa masalah struktural tersebut telah membatasi kontribusi dan ruang gerak kalangan akademik dalam pembangunan nasional. Lebih jauh, hal tersebut telah menyebabkan kalangan akademik sulit menjalin interaksi dengan kolega mereka dari bidang yang berbeda dan interaksi yang lebih global (Rakhmani dan Siregar 2016).

Lain di perguruan tinggi, lain pula di lembaga-lembaga riset nonpemerintah. Riset yang dilakukan lembaga-lembaga ini lebih mengandalkan dukungan finansial dari donor asing. Namun, seiring dengan makin berkembangnya perekonomian negara-negara Asia Tenggara, donor pun satu demi satu hengkang dari Indonesia. LSM pun dilepaskan dari program bantuan mereka sebagaimana terjadi di negara-negara Asia Barat beberapa tahun lalu (Saidi 2006).

## B. Kontribusi Filantropi Pendukung Riset

Perbaikan skema dan pendanaan riset oleh pemerintah menjadi perhatian lembaga-lembaga nonpemerintah yang sejak lama menggeluti dunia riset. Dukungan riset dari luar lembaga negara sebagai bagian dari kegiatan filantropi yang masih sporadis dipotret PIRAC. Mengutip *Republika*, PIRAC (2016) menengarai kealpaan pada peran penting riset inilah yang membuat Indonesia jauh tertinggal dari negara lain. Menurut World Economic Forum, kualitas lembaga riset Indonesia pada 2015 mendapat skor 4,8 (skala 1-7) dan menempati urutan ke-41 dari 144 negara. Posisi ini di bawah negara ASEAN lain seperti Singapura (skor 5,6 di urutan ke-11) dan Malaysia (skor 5,2 di urutan ke-20).<sup>7</sup>

Hasil studi PIRAC dan Dompot Dhuafa mencatat, sebanyak 1.416 kegiatan filantropi selama 2014 yang dilakukan oleh 400 perusahaan nilainya mencapai Rp 12,4 triliun atau Rp 1,04 triliun per bulan. Jika dibandingkan

5 Kompas, 21 Januari 2016.

6 Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi X Tahun 2016 halaman iv.

7 Proposal Riset Kajian Diagnostik Lembaga Filantropi Pendukung Riset di Indonesia, 2016, halaman 3.

dengan data 2013 yang menyentuh Rp 8,6 triliun, atau sekitar Rp 718 miliar per bulan, ada peningkatan jumlah yang sangat signifikan. Jumlah sumbangan di atas Rp 1 miliar meningkat. Sebaliknya, sumbangan di bawah Rp 100 juta berkurang. Tren tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan mulai percaya diri bahwa aktivitas filantropinya berdampak positif (Hiqmah 2016). Jika ditelusuri lebih jauh, studi tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 19,42 persen dari total sumbangan perusahaan sepanjang 2014, yakni sebesar Rp 2,41 triliun, dialirkan filantropi perusahaan untuk bidang pendidikan dan riset. Namun, angka-angka tersebut belum bisa ditafsirkan bahwa telah ada perhatian terhadap sektor riset sebagai bagian dari investasi sosial di masa depan.

Berdasarkan studi awal, dalam riset ini diperoleh informasi bahwa dukungan dana untuk riset tidak hanya menjadi perhatian pemerintah. Lembaga-lembaga filantropi dan swasta sebetulnya telah lama menyoroti pentingnya pendanaan riset dan pengabdian masyarakat meski dalam skala terbatas. Lembaga filantropi mendukung riset dengan membuat penelitian mandiri lewat divisi litbangnya atau memberikan sumber daya berupa dana kepada pihak ketiga untuk melakukan riset. Swasta yang peduli adalah lembaga filantropi berbasis perusahaan, yang biasanya berbentuk yayasan perusahaan, dan pihak perusahaan langsung melalui program CSR. Sayangnya, hasil penelitian dari proyek riset yang didukung lembaga filantropi masih dikonsumsi untuk keperluan internal lembaga.

Informasi menarik lainnya, dukungan riset dari program CSR justru dibuatkan dalam proyek atau program tersendiri dan dilaksanakan secara mandiri. Contohnya, seperti yang dilakukan Nutrifood Research Grant dan Indofood Riset Nugraha. Lembaga riset yang dikendalikan korporasi ini dalam batas tertentu tetap memperhatikan pentingnya hasil riset. Walaupun harus diakui hasil risetnya lebih sering digunakan untuk kepentingan pengembangan perusahaan

sendiri.

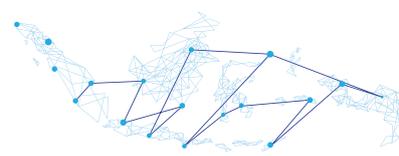
Di luar lembaga riset yang disetir korporasi tersebut, ada pula institusi riset yang didirikan perusahaan dengan dana CSR seperti Danone Research Institute. Lembaga ini tak hanya berorientasi untuk mengembangkan korporasi, tapi juga peduli terhadap pengembangan riset untuk ilmu pengetahuan dan masyarakat. Bentuk konkret dukungan riset ini dilakukan dengan menggelar kompetisi dan *call for proposal* riset secara terbuka setiap tahun. Namun, walaupun orientasinya bukan hanya untuk kepentingan perusahaan, pelaksanaan program penelitian tersebut belum melibatkan LSM.

Ihwal skema pendanaan riset yang dimotori oleh yayasan keluarga, Yayasan Nation Building (Nabil) yang berkantor di Jakarta patut disebut. Yayasan ini lekat dengan sosok pengusaha beretnis Tionghoa yang peduli dengan pemahaman dan dialog budaya. Eddie Lembong, demikian nama pengusaha ini, cukup lama berkecimpung secara pribadi atau bersama pengusaha beretnis Tionghoa lain dalam mengembangkan dialog budaya. Contohnya, Eddie turut aktif dalam Perhimpunan Tionghoa Indonesia (INTI). Ia salah satu pendiri lembaga ini dan menjabat ketua umum periode pertama, 1999-2005.<sup>8</sup>

Yayasan Nabil, yang didirikan Eddie selepas menjabat Ketua Umum INTI, lebih diarahkan pada kegiatan seminar, penerbitan buku dan majalah Nabil Forum, serta pemberian penghargaan tahunan "Nabil Award" untuk ilmuwan sosial yang ikut memberikan kontribusi terhadap *nation building*, baik melalui pemikiran maupun perbuatan. Pada 2014, lembaga ini pernah mengadakan sayembara menulis untuk mahasiswa, dosen, jurnalis serta masyarakat umum.<sup>9</sup> Namun, Yayasan Nabil belum menggandeng LSM untuk mewujudkan visi dan misi lembaga tersebut. Hampir semua kegiatan dilakukan

8 Lihat [http://inti.or.id/about\\_us.html?id=18a49780-aff-4959-8aa8-de5321782756](http://inti.or.id/about_us.html?id=18a49780-aff-4959-8aa8-de5321782756), diakses pada 8 Mei 2016, dan Kompas, 11 November 2009.

9 Lihat <http://www.nabilfoundation.org/about>, diakses pada 8 Mei 2016.



oleh Yayasan Nabil sendiri.

Yayasan keluarga seperti Yayasan Nabil ini patut didorong agar menjadi model bagi lembaga-lembaga yang sudah ada. Ke depan, diharapkan akan muncul lembaga-lembaga filantropi seperti Ford Foundation atau Rockefeller Foundation di Indonesia yang memberikan dukungan dan dana bagi riset-riset mandiri dan riset murni. Sebenarnya mereka yang memiliki kekayaan berlebih sudah menelurkan ide-ide segar untuk mendukung investasi sosial, termasuk riset. Namun, kegiatan riset belum mendapat perhatian penuh. Kebanyakan memilih kegiatan karitatif—hanya memberi umpan, bukan kail kepada masyarakat. Investasi sosial dimaknai sebagai konsesi—parahnya lagi sebagai uang tutup mulut. Ketika masyarakat terbiasa dengan kegiatan karitatif itu, yang terjadi kemudian adalah ketergantungan. Relasi dengan korporasi akhirnya bersifat patron-klien. Bagaimanapun, investasi sosial akan lebih tepat bila berbentuk pendanaan riset.

### C. Karakteristik Filantropi di Indonesia

Praktik kedermawanan ditandai oleh perkembangan gerakan filantropi yang lebih terorganisasi. Lembaga filantropi menawarkan aktivitas karitatif yang dampak sosialnya terbatas hingga kegiatan yang menawarkan gagasan transformatif tentang keadilan sosial (Latief 2013). Tidak jarang bahwa gerakan filantropi di Indonesia yang kolektif dan terorganisasi sejak tiga dekade lalu itu merupakan perkembangan dari praktik kedermawanan bermotif agama. Dengan dukungan lembaga-lembaga Islam misalnya, yang direpresentasikan oleh organisasi filantropi dan lembaga swadaya masyarakat, kegiatan kedermawanan memasuki sebuah arena yang meniscayakan modernisasi dan profesionalisme kerja sosial (Latief 2013).

Budaya berderma merepresentasikan solidaritas, ketaatan beragama, kohesi sosial, hingga altruisme. Berderma juga, merupakan

cara untuk menciptakan relasi patron-klien, interaksi resiprositas atau timbal-balik, dan mengekspresikan kebanggaan, kekuatan, dan dominasi. Di balik tafsir yang sangat luas terhadap makna berderma dalam masyarakat, tradisi kedermawanan yang bersandar pada faktor keagamaan masih merupakan isu utama di kalangan kaum muslim di berbagai belahan dunia (Latief 2013). Hal seperti ini merupakan modal sosial yang kuat dalam masyarakat. Merujuk Putnam, modal sosial berarti hubungan antarindividu, jaringan sosial, norma-norma resiprositas, dan kepercayaan sosial yang memfasilitasi kerja sama saling menguntungkan antaranggota masyarakat (Latief 2013).

Semangat membentuk lembaga filantropi juga menjalar di kalangan pelaku bisnis. Walau begitu, filantropi perusahaan tumbuh bukan hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan perusahaan, tapi juga berkat munculnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini mendorong dipraktikkannya etika bisnis terutama oleh perusahaan yang berkiprah di sektorsumberdayaalamuntukmengalokasikan anggaran CSR-nya melalui kegiatan yang dikerjakan pihak perusahaan sendiri atau lembaga nonprofit di luar perusahaan.

Lembaga filantropi perusahaan sebagian besar berbentuk yayasan, yang didirikan melekat dengan perusahaan. Beberapa contohnya antara lain Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA), Yayasan Danamon Peduli, Djarum Foundation, Yayasan Unilever Indonesia, serta Coca Cola Foundation Indonesia. Besaran dana yang disalurkan dan strategi kerja mereka belum diketahui. Mereka banyak bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, konservasi lingkungan, serta pengembangan usaha kecil. Isu yang terkait dengan kebijakan publik belum dijajaki.

Meski lembaga filantropi menggandeng nama perusahaan, keberadaannya belum dirasakan oleh lembaga-lembaga pihak ketiga, yakni LSM, yang selama ini terbiasa bekerja

sama dengan lembaga donor asing. Yang lebih mengejutkan, ternyata ditengarai yayasan-yayasan tersebut turut mengajukan proposal kepada lembaga donor luar negeri (Anand 2014).

Selain yayasan yang terafiliasi dengan perusahaan, tumbuhnya filantropi melalui yayasan keluarga menarik untuk dicermati. Contohnya, pengalaman Nabil Foundation di atas. Pada dasarnya, mereka adalah pelaku bisnis yang memiliki kemampuan finansial dan lantas mendirikan lembaga filantropi untuk menyalurkan kedermawanannya kepada publik. Filantropi keluarga ini cukup unik karena mereka sendiri yang menentukan sektor mana yang akan didanai. Bahkan, dukungan terhadap aktivitas riset pun ditentukan secara personal—peduli atau tidak tokoh di filantropi keluarga tersebut terhadap isu-isu publik, termasuk riset.

Di di Asia Tenggara, seperti Indonesia dan Singapura, yayasan keluarga dengan kegiatan filantropinya tumbuh dalam beberapa tahun terakhir, terutama selepas krisis moneter yang mendera kawasan ini pada 1997. Pendirian yayasan keluarga tidak lepas dari “tradisi” para konglomerat menjalankan bisnisnya dengan berbasis keluarga. Pelibatan unsur keluarga juga yang dibawa saat mereka menjalankan filantropi dengan mendirikan yayasan. Di Indonesia, beberapa di antaranya adalah Yayasan Eka Tjipta Wijaja, Tanoto Foundation, dan Yayasan Arsari Djojohadikusumo.

Nama-nama yang terkait dengan yayasan tersebut dikenal publik sebagai pengusaha kelas atas yang dianggap memiliki kepedulian dan bersedia membagi keuntungan bisnisnya untuk mengembangkan pendidikan melalui skema beasiswa. Kepedulian terhadap bantuan belajar ini secara otomatis mendukung kegiatan riset mengingat penyelesaian tugas akhir mahasiswa senantiasa melalui proses riset. Hanya, kiprah yayasan keluarga tersebut tidak luput dari sorotan. Yayasan keluarga kurang melibatkan kelompok masyarakat sipil dan lebih sering berjalan sendirian dalam

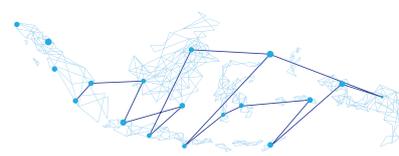
menjalankan programnya. Walaupun begitu, keberadaan mereka potensial. Apalagi, pada saat mulai susutnya pendanaan dari luar negeri untuk kegiatan filantropi.

Fenomena memudarnya pendanaan dari luar negeri di satu sisi dan keinginan untuk mengembangkan masyarakat di sisi lain bisa disimak dari latar belakang pendirian lembaga Instituto Betty e Jacob Lafer di Brasil. Yayasan ini didirikan dan dikelola oleh keluarga yang diabadikan menjadi nama lembaga tersebut. Didirikan pada 2013, lembaga ini berfokus pada manajemen dan inovasi kebijakan publik serta pengurangan ketimpangan dalam sistem peradilan. Menariknya, pendirian lembaga ini di tengah mulai perginya lembaga donor internasional, seperti MacArthur Foundation atau the W. K. Kellogg Foundation, dari Brasil yang menganggap perekonomian negara itu semakin baik.

Sejak 2011, Instituto Betty e Jacob Lafer, atau Institut Betty dan Jacob Lafer, menginvestasikan US\$ 1,1 juta ke dalam 27 proyek. Khusus pada 2015, yayasan ini mengeluarkan dana sebesar US\$ 470 ribu. Yayasan masih berharap donor dari dalam negeri bergabung dengan mereka. Yang mengagumkan, lembaga ini tidak mengerjakan sendiri proyek-proyeknya, melainkan melalui mekanisme pemberian hibah atau *grant making* dengan LSM sebagai pelaksananya (Lafer 2015).

Sepeninggal lembaga-lembaga donor asing di Brazil, menurut survei lembaga Institutions Foundations and Companies Group (GIFE) pada 2012, dana investasi sosial dari pendanaan swasta dalam negeri mencapai US\$ 1,15 miliar. Dari jumlah tersebut, 8 persennya berasal dari lembaga keluarga. Di sisi lain, baru 15 persen dana disalurkan dalam kegiatan yang dikerjakan oleh pihak lain atau melalui *grantee* LSM. Sisanya, dikerjakan lembaga pendanaan atau lembaga donor sendiri (Lafer 2015).

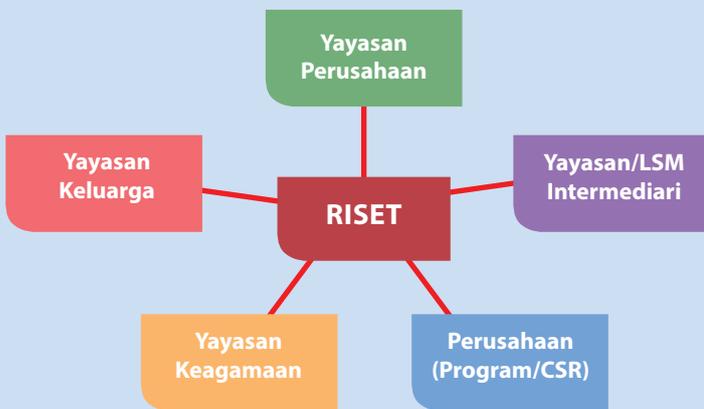
Pengalaman berdirinya yayasan keluarga di Brazil tadi memberikan gambaran bahwa



inisiatif investasi sosial berbasis keluarga dapat berperan penting dalam pengembangan masyarakat. Lembaga semacam ini kadang tidak terkait dengan industri tertentu, sehingga lebih bebas menentukan isu yang ditangani.

# Peta dan Pola Dukungan Lembaga Filantropi Riset

**Grafik 1: Aktor Pendukung Riset di Luar Pemerintah dan Donor Internasional**



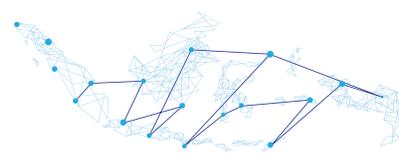
Pada bab ini, akan dijelaskan peta dan pola dukungan lembaga filantropi terhadap riset berdasarkan temuan. Sesuai dengan definisi di bagian sebelumnya, lembaga filantropi pendukung riset yang dimaksud dalam studi ini adalah lembaga atau organisasi yang memberikan dukungan dalam aneka bentuk (dana, akses dan rekomendasi, data, fasilitas laboratorium, hingga material riset) dengan nilai tertentu yang diperuntukkan bagi kegiatan riset, baik murni maupun pendukung program, di semua bidang.

Studi ini memetakan pelaku atau aktor filantropi pendukung riset dan pola dukungan mereka. Pelaku atau aktor filantropi yang dimaksud meliputi yayasan keluarga, filantropi

perusahaan (yayasan perusahaan, CSR, atau program yang mendukung riset), dan organisasi intermediari (yayasan keagamaan, LSM). Sedangkan pola dukungan terkait dengan bentuk, besaran, sumber dukungan, alokasi anggaran dukungan riset, hingga lokasi riset yang didukung dan jadwal pengajuan untuk dukungan riset. Ada juga isu atau tema riset yang didukung, alasan dan tujuan pemberian dukungan, mekanisme penyaluran dukungan, pola pengambilan keputusan dalam mendukung riset, dan mitra yang didukung dan kriterianya. Profil aktor pendukung dan pola dukungannya dijelaskan di bawah ini.

## A. Profil Aktor Filantropi Pendukung Riset

Lembaga filantropi pendukung riset yang dipetakan dalam studi ini meliputi yayasan keluarga, filantropi perusahaan, dan organisasi yang berperan sebagai *grant maker* (pengumpul dana) atau intermediari (pengumpul dana sekaligus penyalur dana/katalisator). Mengapa perusahaan termasuk dalam kajian ini? Perusahaan yang dimasukkan sebagai responden dan narasumber dalam studi ini adalah mereka yang mendukung riset dengan skema hibah. Sebab itu, istilah dalam



kategori disebut filantropi perusahaan.

Dari sekian jenis lembaga filantropi pendukung riset, kemudian dirampingkan dalam tiga kategori, tanpa menghilangkan kekhasan dan karakteristik mereka. **Pertama**, yayasan keluarga, meliputi lembaga yang didirikan dan/atau dijalankan oleh keluarga. **Kedua**, filantropi perusahaan yang terdiri dari yayasan perusahaan dan CSR, atau program hibah yang dikelola oleh perusahaan. **Ketiga**, organisasi intermediari yang dalam konteks ini berarti organisasi atau lembaga yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat sipil dan berfungsi sebagai katalisator antara penyandang dana dan mitra lokal. Lembaga yang termasuk dalam kategori intermediari meliputi lembaga berbasis LSM seperti Yayasan KEHATI dan YAPPIKA, serta keagamaan seperti Dompot Dhuafa dan Yayasan Budha Tzu Chi.

Mengacu pada **Grafik 2**, dari ketiga kategori lembaga filantropi pendukung riset dengan jumlah responden yang menjadi sampel pada penelitian ini sebanyak 29, maka organisasi intermediari merupakan lembaga yang dominan memberikan dukungan riset. Besarnya dukungan dari organisasi intermediari disebabkan oleh pemahaman lembaga terhadap pentingnya riset. Khususnya, organisasi intermediari berbasis LSM yang sudah lama menerapkan siklus data riset (*research data lifecycle*) pada program dan manajemen organisasinya. Organisasi intermediari berbasis LSM dan keagamaan merupakan lembaga publik yang juga bertanggung jawab kepada publik. Sehingga,

mereka mempunyai kesadaran untuk memberikan kontribusi sekaligus melakukan pertanggungjawaban publik tanpa meniadakan mekanisme pertanggungjawaban filantropi perusahaan dan yayasan keluarga.

Temuan studi ini menunjukkan bahwa lembaga filantropi yang berhasil diwawancarai sebagian besar menempatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban keuangan yang transparan kepada publik sebagai hal utama. Tujuannya, untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat.<sup>10</sup>

Kepercayaan publik adalah hal yang harus dijaga baik-baik. Sebagai gambaran, Yayasan Tahija—lembaga filantropi yang didirikan oleh keluarga Yulius Tahija—selalu mengupayakan riset ilmiah terbaik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Salah satunya dengan memberikan dukungan optimal agar penelitian menggunakan metode riset paling tepat meski membutuhkan sumber daya lebih besar.

Dari **Grafik 2** terlihat bahwa baik filantropi perusahaan dan yayasan keluarga memiliki kecenderungan cukup sama dalam mendukung riset. Dengan kata lain, kesadaran atas pentingnya riset sebagai basis setiap program dan aktivitas lembaga dan lembaga mitranya relatif cukup merata di hampir semua kategori lembaga filantropi.

## B. Besaran, Bentuk, dan Sumber-sumber Dukungan

Dukungan lembaga filantropi bagi pengembangan riset cukup besar. Data tentang filantropi perusahaan yang dikumpulkan dari riset PIRAC dan Dompot Dhuafa pada 2015 menyebutkan bahwa dana filantropi perusahaan pada 2014 mencapai Rp 12,45 triliun. Ini belum memperhitungkan alokasi dana yang dikelola dan disalurkan oleh yayasan keluarga dan organisasi intermediari berbasis LSM dan keagamaan.

**Grafik 3** mencatat bahwa anggaran program yang dikelola oleh lembaga filantropi pendukung riset sebenarnya cukup besar.



<sup>10</sup> Wawancara dengan Agus Susanto.

**Grafik 3: Alokasi Anggaran Program**



Survei menyebutkan 79 persen responden memiliki anggaran untuk program organisasi mereka di atas Rp 3 miliar. Survei juga menanyakan alokasi anggaran khusus untuk riset dan program yang berkaitan dengan riset. Hasilnya terlihat pada **Grafik 4**. Penting untuk dicatat, bahwa 24 persen lainnya tidak mematok alokasi khusus untuk dukungan dana riset, tapi mempertimbangkan kebutuhan riset dan kesesuaian proposal riset yang diajukan. Juga, karena riset tidak dihitung secara terpisah -merupakan bagian dari program yang dijalankan.

Secara umum, **Grafik 4** menggambarkan bahwa riset telah dianggap sebagai kebutuhan penting. Meskipun itu bukan riset murni tapi kajian awal sebelum menjalankan program atau aktivitas sosial suatu lembaga filantropi. Pada praktiknya, baik di yayasan keluarga, filantropi perusahaan, dan organisasi intermediari berbasis LSM maupun berbasis keagamaan telah melakukan *baseline survey* atau penilaian sebelum memutuskan untuk melaksanakan program mereka. Contohnya, Anwar Muhammad Foundation. Yayasan keluarga ini berangkat dari program riset soal kelayakan taraf hidup yang kerap dilakukan oleh Bank Dunia. Yayasan menganggap program riset merupakan hal penting untuk memastikan keberlanjutan program dalam pengabdian masyarakat.<sup>11</sup>

Filantropi untuk mendukung riset memiliki

<sup>11</sup> Wawancara dengan Afandi Arifin.

keragaman bentuk. Dukungan riset lazimnya berupa dana atau uang. Dukungan juga dapat berbentuk fasilitas lain yang dibutuhkan. Misalnya material riset, peminjaman atau pemakaian laboratorium beserta alat-alat dan perlengkapan di dalamnya<sup>12</sup>, asistensi teknis dan konsultasi<sup>13</sup>, hingga pemberian data yang tidak bersifat rahasia.<sup>14</sup>

Pendanaan yang digunakan oleh lembaga filantropi juga berasal dari sumber yang beragam. Lembaga filantropi berbasis perusahaan biasanya berasal dari keuntungan yang diperoleh perusahaan. Tidak sedikit juga

**Grafik 4: Alokasi Dukungan Dana Riset**



lembaga filantropi berbasis perusahaan ini memberikan dukungannya lewat dana operasional perusahaan dari divisi promosi dan komunikasi, pemasaran, dan litbang.

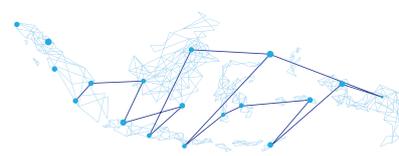
Dukungan riset organisasi filantropi intermediari bersumber dari basis kerja mereka. Untuk lembaga berbasis LSM, berasal dari donor internasional, *internal endowment*, atau kemitraan lainnya.<sup>15</sup> Sementara, lembaga berbasis keagamaan biasanya berasal dari dana wakaf, sedekah, infak, dan donasi individu atau lembaga. Adapun sumber dukungan untuk lembaga filantropi keluarga berasal dari dana pribadi dan dana keluarga

<sup>12</sup> Wawancara dengan Deni Puspohadi.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Fransisca Fitri.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Sirojudin Abbas, PhD.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Asep Suryahadi. Beliau mengatakan bahwa riset di Indonesia seharusnya menggagas satu "*endowment*" bersama. SMERU sebenarnya mempunyai perangkat semacam "dana abadi" yang dialokasikan di dalam perangkat investasi. Tapi, hal itu hanya cukup untuk operasional SMERU.



pendirinya.

### C. Isu/Tema Riset yang Didukung

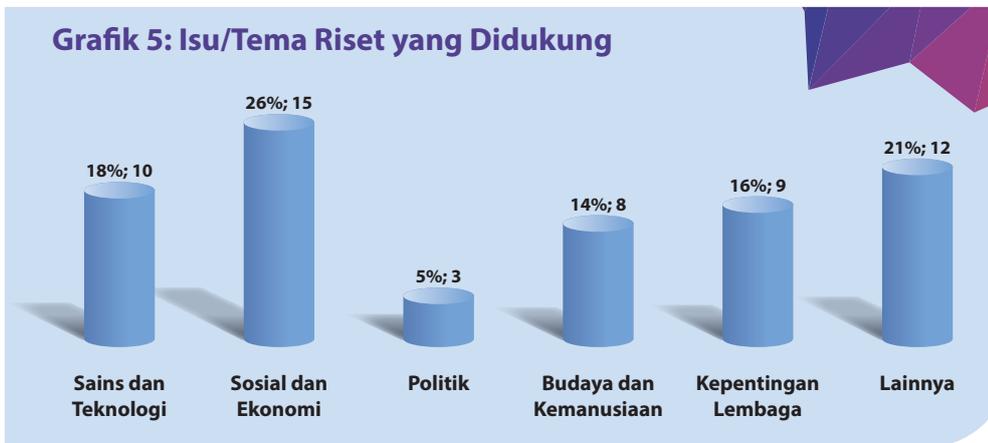
Dukungan terhadap riset dari lembaga filantropi dapat berupa dana riset, kolaborasi program/kegiatan riset, kesempatan untuk menjadi konsultan dan pelaksana riset, asistensi teknis, dan penyediaan pakar riset dan laboratorium. Tema atau isu risetnya meliputi sains dan teknologi, sosial dan ekonomi, politik, budaya dan kemanusiaan, dan riset yang terkait dengan kepentingan atau berdasarkan kebutuhan lembaga sendiri (lihat **Grafik 5**). Sebesar 21 persen riset yang didukung, meliputi tema riset yang lebih spesifik seperti isu lingkungan, kesehatan dan gizi, literasi keuangan, dan evaluasi program lembaga. Kecenderungan dukungan lembaga filantropi terhadap isu riset sering kali menyesuaikan dengan kebutuhan program yang akan dijalankan.

Dalam wawancara, sejumlah lembaga

pemetaan sosial dan dukungan bagi mahasiswa-mahasiswi dengan skema beasiswa PT Adaro Energy.

### D. Alasan dan Tujuan Mendukung atau Mendanai Riset

Hasil survei menunjukkan optimisme dalam pemberian dukungan terhadap riset. Hal tersebut tercermin dari **Grafik 6** yang memperlihatkan cukup besarnya dukungan filantropi terhadap riset dengan alasan kesesuaian dengan visi misi lembaga (28 persen). Angka ini menunjukkan bahwa lembaga filantropi telah menjadikan riset sebagai bagian tak terpisahkan dalam proses pengambilan keputusan. Juga, menjadi nilai tambah karena organisasi telah berupaya mengimplementasikan *evidence-based value* di internal mereka. Misalnya di Citi Peka Indonesia yang mensyaratkan mitranya untuk memasukkan kegiatan riset atau kajian awal sebelum implementasi program. Hal ini untuk



filantropi menyebutkan secara spesifik tema riset yang didukung dan menjadi prioritas lembaga. Misalnya, bagi Yayasan Unilever, riset yang didukung adalah riset tentang kedelai hitam, sampah, dampak bisnis Unilever terhadap lingkungan, riset yang mendukung bisnis inti Unilever, hingga evaluasi program. Sedangkan Citi Peka Indonesia mendukung riset pemberdayaan remaja hingga melek literasi keuangan. Adapun riset yang didukung YAPPIKA adalah tentang pelayanan publik. PT Adaro Energy pernah melakukan riset

memastikan program yang diimplementasikan menjadi kebijakan yang strategis dan berdampak pada jangka panjang.<sup>16</sup> Yayasan Tahija juga mengemukakan bahwa riset merupakan cara efektif untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.<sup>17</sup>

Alasan lainnya, sebagai kontribusi untuk menyelesaikan persoalan yang muncul di

<sup>16</sup> Wawancara dengan Puni A. Anjungsari.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Anastasius Wahyuhadi. Beliau menegaskan bahwa pilihan pada riset dalam program mereka merupakan dasar yang kuat untuk memberikan jaminan bagi keberlanjutan program.

## Grafik 6: Alasan Mendukung Riset



masyarakat, bagian dari strategi perusahaan, dan sesuai dengan kebutuhan lembaga pendukung atau perusahaan (masing-masing sebesar 18 persen). Alasan-alasan tersebut lumrah bagi lembaga pendukung riset karena masih menjadi tolok ukur tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, PT Adaro Energy mengungkapkan bahwa salah satu tujuannya mendukung riset untuk mempersiapkan program perusahaan yang direncanakan.<sup>18</sup> Kegiatan pemetaan sosial dilakukan untuk mengetahui pemain kunci di wilayah kerja, potensi, sumber daya, kebutuhan riil masyarakat, hingga persoalan yang dihadapi warga. Sehingga, program yang dibuat kelak berdampak positif bagi masyarakat sekitar. Pernyataan serupa juga muncul dari lembaga filantropi intermediari berbasis keagamaan seperti Dompot Dhuafa, yang pada hampir setiap programnya dilakukan penilaian (*assessment*) terlebih dulu.

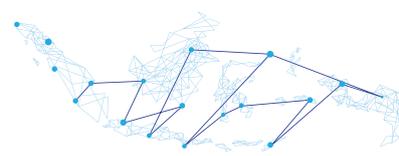
Selain untuk mengukur kesiapan program, dukungan terhadap riset sudah ada dalam visi dan misi lembaga seperti di Yayasan Tahija. Yulius Tahija, sebagai salah satu aktor filantropi di Indonesia, memahami riset dan ilmu pengetahuan memiliki posisi penting dalam memajukan masyarakat. Pengembangan riset dimaksudkan untuk memajukan masyarakat sehingga dapat mengiringi perkembangan korporasi.<sup>19</sup> Yayasan Tahija yang dalam beberapa waktu terakhir aktif mengembangkan

cara penanggulangan demam berdarah dengan menggunakan perangkat teknologi paling mutakhir, cukup sadar bahwa mereka harus memberi contoh yang kuat bagi pengembangan riset ke depan. Penerapan sains pun didukung dengan program pengembangan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Berdasarkan jadwal pelaksanaan program Yayasan Tahija, dukungan terhadap pengembangan riset masih terus berlanjut setidaknya hingga tahun 2019 mendatang.

Pada **Grafik 6**, alasan mendukung riset sebagai kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dipilih sebanyak 13 persen responden. Artinya, riset lembaga filantropi belum didorong secara masif ke arah pengembangan ilmu pengetahuan. Riset-riset yang didukung merupakan penelitian dengan tema yang masih berkaitan dengan kebutuhan program dan kesesuaian kepentingan lembaga. Meski demikian, dengan dukungan tersebut secara tidak langsung telah berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, baik terkait dengan tema dan bidangnya maupun metodologi risetnya. Dari data yang ditampilkan **Grafik 6**, ada alasan lain yang disebutkan responden (5 persen). Alasan tersebut meliputi, di antaranya, untuk mendukung program pemerintah, program yang dihasilkan lebih strategis dan berkelanjutan, serta agar terjadi pengembangan kapasitas organisasi.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ghufon Solikhin.

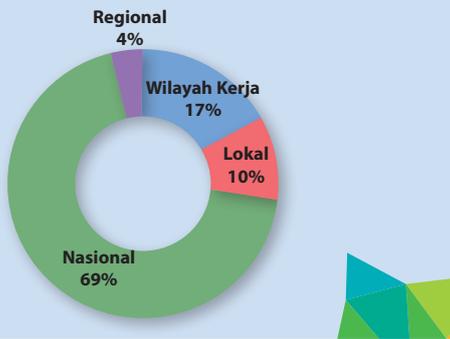
<sup>19</sup> Wawancara dengan Anastasius Wahyuhadi dan Agus Susanto.



### E. Lokasi atau Cakupan Wilayah Riset yang Didukung

**Grafik 7** memperlihatkan sebanyak 69 persen responden menjawab cakupan risetnya untuk seluruh wilayah di Indonesia atau nasional. Artinya, lembaga filantropi pendukung riset tidak menjadikan satu daerah tertentu sebagai wilayah paling penting meskipun pada praktiknya riset dilakukan per wilayah.

**Grafik 7: Cakupan Wilayah Dukungan Riset**



Meski demikian, masih ada 17 persen responden yang membatasi lokasi riset hanya di sekitar wilayah kerjanya. Hal ini sebagai upaya lembaga tersebut dalam mengoptimalkan penyelesaian persoalan atau pemberdayaan masyarakat sehingga lebih terfokus. Adapun lembaga filantropi pendukung riset lainnya (10 persen) lebih memilih daerah tertentu sebagai fokus risetnya.

Program pengembangan bakteri *Wolbachia* pada nyamuk *Aedes Aegypti* oleh Yayasan Tahija bersama dengan Universitas Gadjah Mada merupakan salah satu contoh program

riset yang bersifat lokal—hanya dilakukan di wilayah Yogyakarta. Tapi, hasilnya sangat bernilai bagi kemajuan ilmu pengetahuan nasional dan global.

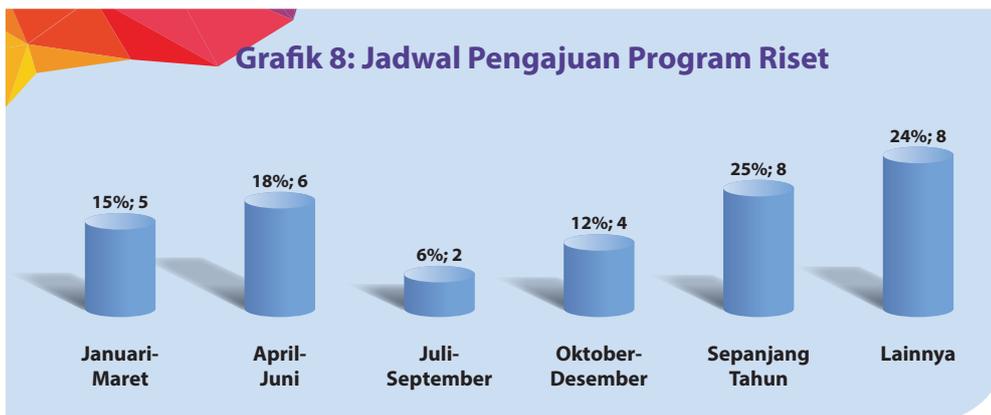
Sebanyak 4 persen responden memberikan dukungan risetnya melintasi batas wilayah negara. Riset semacam ini disebut sebagai riset regional dan biasanya terkait dengan isu-isu global seperti isu demokrasi dan hak asasi manusia. Riset umumnya dilakukan lembaga filantropi yang berbasis pendanaan internasional. Pengembangan isu global dalam riset yang didukung oleh lembaga filantropi di Indonesia tercermin dari program lembaga. Misalnya, penanganan pengungsi.

### F. Waktu Pengajuan Dukungan untuk Riset

Ada dua pola dalam pengajuan dukungan riset kepada lembaga filantropi. Pertama, berdasarkan siklus operasional lembaga dan biasanya terbagi menjadi empat kuartal dalam setahun. Kedua, berdasarkan kebutuhan riset internal dan eksternal. Dibandingkan dengan pola pertama, pola kedua memberikan keleluasaan bagi lembaga riset atau peneliti untuk melakukan riset sesuai jadwal mereka sendiri. Dengan kata lain, lembaga riset atau peneliti dapat mengajukan permintaan dukungan tanpa terbatas waktu.

Waktu pengajuan dukungan ada jadwalnya sendiri dan bergantung pada tahun fiskal lembaga dan kebutuhan riset (lihat **Grafik 8**). Namun, banyak juga lembaga filantropi yang tidak menjadwalkan secara khusus waktu pengajuan dukungan riset (25 persen).

**Grafik 8: Jadwal Pengajuan Program Riset**



Dengan kata lain, permohonan dapat diajukan sepanjang tahun. Ada juga lembaga filantropi yang menjawab bahwa pengajuan dukungan tergantung dari permintaan internal dan eksternal. Selain itu, ada yang menjawab tentatif atau tidak tentu. Beberapa yayasan intermediari berbasis LSM menyatakan pengajuan dukungan riset bergantung pada ada tidaknya dukungan donor pada saat pengajuan.

### G. Metode Penyaluran Dukungan Riset

Lembaga filantropi menyalurkan dukungannya terhadap riset melalui dua metode. Pertama, *call for proposal*. Kedua, sindikasi atau pemilihan mitra yang sudah dikenal (internal). Berdasarkan survei, ada 48 persen lembaga filantropi yang menerapkan *call for proposal*. Metode tersebut dianggap memberikan kesempatan yang luas kepada mereka yang memiliki perhatian pada isu yang sesuai dengan tema proposal. Selain itu,

**Grafik 9: Metode Penyaluran Dana Riset**



metode ini juga memberikan pelajaran bagi lembaga riset atau peneliti dalam menulis proposal penelitian yang baik.

Bagi lembaga filantropi, metode *call for proposal* memberikan kekayaan sudut pandang mengenai isu atau tema yang dikaji dan metode riset yang digunakan. Meskipun, pada akhirnya lembaga filantropi harus memilih proposal yang sesuai dengan kebutuhannya.

Adapun metode sindikasi dipilih oleh 38 persen lembaga filantropi. Alasannya cukup

mendasar, yaitu untuk mengelola dana lembaga, apalagi dana yang diperoleh dari publik, dibutuhkan kepercayaan yang lebih, dan itu bisa diemban oleh lembaga yang telah dikenal. Lembaga filantropi menerapkan standar persyaratan yang ketat dalam menyeleksi mitra lembaga riset. Menurut Ahsin, seleksi mitra untuk riset di Dompot Dhuafa dilakukan dengan menerapkan kriteria penilaian ganda, yakni secara objektif dan subjektif.<sup>20</sup> Penilaian objektif terkait dengan kapasitas, kredibilitas, dan kesesuaian program yang diajukan. Sedangkan penilaian subjektif lebih mengarah pada penilaian atas kedekatan mitra dengan penyelenggara dukungan. Hal ini dilakukan untuk menjaga amanat publik yang telah menitipkan dana sumbangannya ke organisasi. Metode sindikasi juga diterapkan di Anwar Muhammad Foundation.<sup>21</sup> Yayasan ini mengatakan bahwa setelah adanya koordinasi langsung dengan mitra riset, pendelegasian pelaksanaan riset hanya di tatanan perangkat, pelaporan data, dan dana. Namun, analisis riset dilakukan di Anwar Muhammad Foundation.

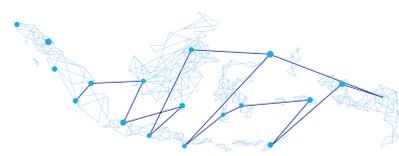
Responden lainnya, sebanyak 14 persen, menyalurkan dukungan riset lewat jaringan dan konsorsium. Sejumlah lembaga filantropi memiliki konsorsium, dengan penyaluran dukungan didiskusikan di dalam konsorsium yang menjadi jaringannya. Pemberian dukungan kepada mitra anggota dilakukan dengan cara yang disepakati bersama. Untuk menjaga distribusi dukungan, konsorsium menunjuk secara bergilir dengan memberi catatan untuk menjaga kualitas riset dan program yang akan dilaksanakan.<sup>22</sup>

Dukungan terhadap riset dijatuhkan mempertimbangkan berbagai macam hal seperti kredibilitas, rekam jejak, kualitas, pengalaman bersama, kesamaan visi, atau bahkan kesamaan selera (*chemistry*). Dalam banyak kasus, dukungan terhadap riset diberikan kepada individu atau lembaga yang

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ahsin Aligori.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Afandi Arifin.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Fransisca Fitri.



sudah memiliki reputasi yang panjang. Pengalaman juga menjadi faktor penting. Untuk menjamin kualitas riset, sering kali lembaga filantropi hanya mendukung riset yang dilakukan oleh lembaga atau perguruan tinggi yang pernah bekerja sama dengan mereka. Contohnya adalah pilihan Yayasan Tahija untuk bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam riset penanggulangan demam berdarah.<sup>23</sup>

#### H. Penerima Manfaat Dukungan Riset

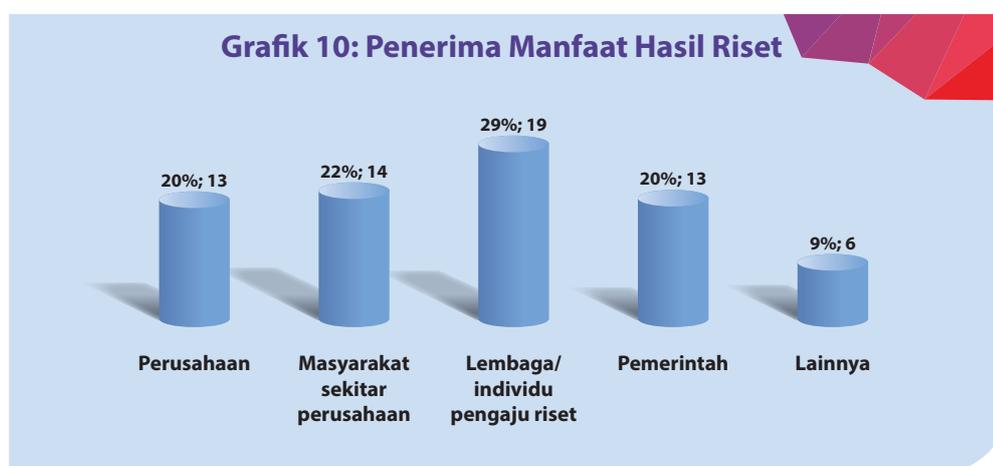
Berdasarkan data survei, hasil riset lebih banyak memberikan manfaat kepada lembaga atau individu pemohon dukungan riset (29 persen) seperti terlihat pada **Grafik 10**. Angka ini cukup besar mengingat dukungan riset dengan skema beasiswa cukup banyak. Ini mengindikasikan dua hal. Pertama, riset belum mengarah pada riset terapan dan berdampak kepada masyarakat. Kedua, melalui riset yang didukung, lembaga filantropi ikut berperan dalam memberikan pengalaman dan jam terbang peneliti. Adanya penunjukan penerima manfaat riset dari perguruan tinggi dan lembaga riset lokal merupakan permintaan khusus dari perusahaan penyedia dana riset dengan alasan untuk memberdayakan masyarakat lokal.<sup>24</sup> Perlu ada upaya untuk mendorong lembaga filantropi agar mendukung

riset yang berkontribusi langsung pada masyarakat atau melalui kebijakan pemerintah. Sehingga, riset yang didukung lembaga filantropi memiliki nilai yang strategis.

Sebanyak 22 persen responden menyatakan memberikan dukungan riset yang berkontribusi pada masyarakat sekitar di lembaga filantropi, baik itu lembaga berbasis perusahaan maupun yayasan independen. Riset dengan penerima manfaat masyarakat sekitar lembaga filantropi biasanya merupakan riset aksi dan riset advokasi, penilaian, dan *baseline survey* untuk program yang akan dijalankan di wilayah masyarakat tinggal.

Sedangkan responden yang menjawab perusahaan dan pemerintah sebagai penerima manfaat hasil riset masing-masing berjumlah 20 persen. Perusahaan dan pemerintah dianggap sebagai pihak yang bisa meneruskan hasil riset ke tingkat yang lebih luas dan strategis. Sisa responden, 9 persen, mengatakan penerima manfaat adalah masyarakat luas dan perguruan tinggi.

Temuan ini menunjukkan bahwa riset belum berdampak luas kepada masyarakat dan belum bisa mengubah kebijakan pemerintah secara signifikan. Survei ini juga menunjukkan bahwa masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama diperlakukan secara khusus berdasarkan wilayah tertentu.



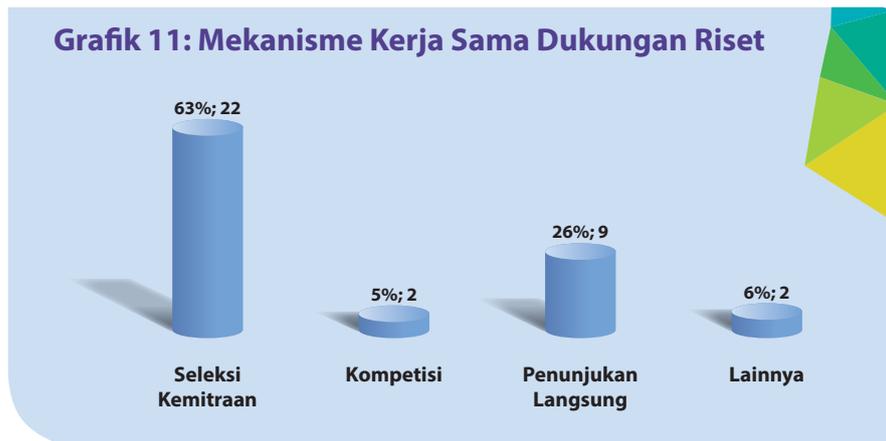
<sup>23</sup> Wawancara dengan Agus Susanto.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Afandi Arifin.

## I. Mekanisme Kerja Sama Dukungan Riset

Mekanisme kerja sama yang dibangun di hampir semua lembaga filantropi memiliki kesamaan. Seperti halnya *call for proposal* yang di dalamnya sudah ada kerangka acuan, lembaga riset mengajukan aplikasi dengan menunjukkan desain riset. Barulah kemudian diumumkan lembaga yang bekerja sama dalam riset tersebut.

hal yang muncul dalam evaluasi. Sebagaimana pengalaman Deni Puspohadi, setelah kontrak ditandatangani, dana awal riset dicairkan dan peneliti pun bekerja. Pada pertengahan waktu yang dijadwalkan, peneliti diminta untuk melaporkan laporan kemajuan dan temuan awal penelitian. Tahap ini bertujuan untuk memastikan segala sesuatu sesuai sebagaimana yang direncanakan. Kemudian,



Penyusunan laporan dilakukan melalui dua tahap. Pertama, berupa draf laporan yang akan menjadi bahan masukan bagi evaluasi. Kedua, pelaporan akhir yang memasukkan berbagai

laporan tahap akhir untuk melihat temuan yang dihasilkan oleh peneliti riset.

Pemberian dukungan untuk riset dilakukan oleh lembaga filantropi melalui beberapa mekanisme kerja sama (lihat **Grafik 11**).

Mekanisme kerja sama dukungan riset melalui seleksi kemitraan memang banyak dipakai oleh lembaga filantropi yang menjadi responden studi ini. Seleksi kemitraan melalui *call for proposal* ini bertujuan menjaring lebih banyak desain riset atau program dan memberikan peluang yang luas bagi mitra untuk mendapatkan dukungan riset.

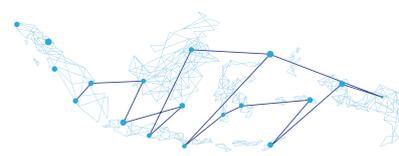
Seleksi dilakukan secara ketat sehingga menjaring pelaksana riset yang memiliki kredibilitas. Hal tersebut dipaparkan oleh Indofood yang menjalin kontrak dengan durasi satu tahun. Nantinya, peserta akan mendapatkan material yang dibutuhkan untuk riset seperti fasilitas laboratorium dan bahan yang akan diteliti.<sup>25</sup>

Pelaksanaan riset yang dijaring melalui seleksi akan sesuai dengan perjanjian dengan

*Ketika Yayasan Unilever akan melakukan kerja sama dengan lembaga riset, Unilever sudah memiliki term of reference (TOR) yang dibagikan ke lembaga-lembaga tersebut. Dalam TOR dijelaskan tujuan, batas waktu, dan hasil akhir. Sebagai umpan balik atas TOR tersebut, lembaga riset akan mengembangkan metode pengumpulan data, penentuan sampel/responden dan lain-lain. Pada pengembangan instrumen penelitian tersebut akan terjadi dialog antara Unilever dengan lembaga riset. Hal ini dilakukan karena Unilever ingin memastikan bahwa instrumen yang dikembangkan memang bisa menangkap informasi data yang dibutuhkan untuk membangun gambaran hasil riset. Sebelum laporan final, akan ada laporan kemajuan yang dibagikan. Apabila ada informasi yang belum muncul di laporan kemajuan tersebut, peneliti akan menggali kembali, sehingga hasilnya dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.*

Waila Wisjnu, Yayasan Unilever Indonesia

<sup>25</sup> Wawancara dengan Deni Puspahadi.



mitra riset. Jika pada awal perjanjian pelaksanaan sudah dirinci secara detail dan seluruh pelaksanaan dibebankan pada mitra lembaga, mandat pengerjaan riset akan diberikan sepenuhnya kepada mitra. Namun, ada juga perjanjian kerja yang tidak merinci pelaksanaan riset sehingga tetap ada intervensi dari pihak penyedia dana.<sup>26</sup>

Hal lainnya dari skema seleksi kemitraan, jika dilakukan secara transparan mulai dari pengumuman dibukanya peluang dukungan hingga hasil riset dijalankan, hal ini dapat menjadi salah satu bentuk pengawasan publik terhadap kerja lembaga filantropi dan lembaga yang terpilih sebagai mitra pelaksana riset.

Temuan lainnya, adanya skema penunjukkan langsung terhadap mitra lembaga filantropi. Mekanisme ini mungkin terdengar tidak adil. Namun, lembaga filantropi memiliki alasan tersendiri seperti demi memegang amanat publik, sehingga perlu menjaga kualitas hasil riset yang akan diberikan kepada masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan banyak lembaga filantropi hanya memberikan dukungan kepada pihak yang sudah dikenal dengan baik. Yayasan Danone dan Yayasan Unilever Indonesia mempunyai tradisi menjaga relasi dalam berbagai riset atau program CSR mereka. Dalam **Grafik 11** terdapat model mekanisme kerja sama lain, yakni model konsorsium dan pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan internal, yang rinciannya tidak bisa disampaikan oleh narasumber.

#### J. Mitra yang Bisa Mengakses Dukungan Riset

Selama ini, dukungan riset dari lembaga filantropi dapat diakses oleh sejumlah kalangan. Di antaranya, perguruan tinggi atau akademisi, lembaga berbasis keagamaan, LSM, dan individu. Studi ini menunjukkan bahwa mitra yang dapat mengakses dukungan sumber daya dan dana dari lembaga filantropi



tidak jauh berbeda dari persepsi awal (lihat **Grafik 12**). Meskipun pendanaan yang disediakan pemerintah untuk perguruan tinggi cukup besar, nampaknya kebutuhan untuk riset dinilai masih kurang sehingga membutuhkan dukungan dari lembaga filantropi yang membuka *call for proposal* dan kompetisi.

Untuk mitra individu, dukungan riset biasanya dimasukkan ke dalam program beasiswa seperti beasiswa penulisan skripsi atau tesis. Program lain yang juga dibuka untuk individu biasanya berupa kompetisi.

Selain mendapatkan dukungan dari lembaga donor internasional, LSM juga melakukan diversifikasi pendanaan, khususnya untuk riset, kepada lembaga-lembaga filantropi, yang mulai terbuka terhadap beragam kemitraan. Hal serupa juga terjadi di lembaga amil zakat (LAZ) atau organisasi pengelola zakat (OPZ) dan lembaga berbasis keagamaan yang berupaya membuka diri untuk dapat mengakses dukungan riset dari lembaga filantropi. Pengakses lainnya adalah mitra dalam konsorsium<sup>27</sup>, lembaga riset, lembaga profesional, dan sekolah (13 persen).

<sup>26</sup> Wawancara dengan Ahsin Aligori.

<sup>27</sup> MP3, singkatan dari Masyarakat Peduli Pelayanan Publik, adalah model konsorsium yang merupakan tempat YAPPIKA menjadi salah satu anggota di dalamnya. YAPPIKA pada saat penelitian berlangsung merupakan koordinator dari konsorsium tersebut. Disarikan dari wawancara dengan Fransisca Fitri.

## K. Kriteria Mitra Riset

Memberikan dukungan riset kepada mitra mengharuskan adanya standar. Apalagi bagi lembaga filantropi yang pendanaannya berasal dari publik. Studi ini memotret sejumlah kriteria yang biasanya ada di lembaga filantropi seperti kredibilitas organisasi, kredibilitas tokoh di organisasi, rekam jejak organisasi, relevansi organisasi, hingga kapasitas dan kapabilitas organisasi (lihat **Grafik 13**).

Pilihan kriteria sebagai mitra selanjutnya adalah relevansi lembaga dengan melihat aktivitas mitra dan isu yang digawangi. Rekam jejak organisasi untuk memastikan dukungan yang diberikan kepada mitra yang berpredikat baik atau setidaknya tidak pernah bermasalah. Ada juga kriteria yang memberikan kepercayaan dukungan kepada mitra yang didasarkan pada ketokohan di lembaga mitra tersebut.



Grafik 13 memperlihatkan bahwa kapasitas dan kapabilitas organisasi serta kredibilitas organisasi merupakan hal yang krusial guna memastikan bahwa kajian atau riset dilakukan oleh mitra yang tepat dalam penggunaan sumber daya hasil risetnya. Citi Peka Indonesia misalnya, menyiapkan metode *due diligence* sebelum bermitra dengan lembaga penyedia jasa riset untuk menilai kredibilitas organisasi. *Due diligence* yang dilakukan meliputi pengecekan reputasi mitra melalui hasil kerjanya, pemeriksaan catatan perbankan ke Bank Indonesia, administrasi, hingga personalia administrasi. Citi Peka Indonesia juga melakukan sindikasi pemain kunci dalam isu pemberdayaan yang akan dilaksanakan melalui penelusuran dari media dan mencocokkannya dengan hasil uji tuntas tadi.<sup>28</sup>

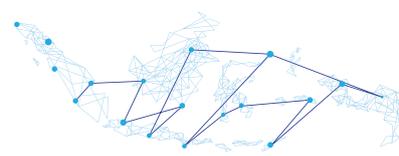
Temuan studi ini menunjukkan ada kriteria lainnya, yakni kesamaan visi dan misi lembaga mitra hingga tujuan dari riset yang tepat guna dan tepat sasaran. Selain penilaian secara objektif berdasarkan kredibilitas dan penilaian publik, kriteria secara subjektif juga masih dipertimbangkan oleh lembaga filantropi. Misalnya kedekatan personal, kedekatan pimpinan, biaya yang kompetitif, dan rekam jejak sebagai mitra lembaga filantropi tersebut.<sup>29</sup>

## L. Pengambil Keputusan Dukungan Riset

Studi ini juga memotret jabatan pengambil keputusan di lembaga filantropi mengenai diberikan atau tidaknya dukungan kepada mitra. Pengambil keputusan dukungan riset di lembaga filantropi meliputi direktur, dewan pengurus atau direksi, hingga manajer program riset (lihat **Grafik 14**). Sebanyak 19

<sup>28</sup> Wawancara dengan Puni Anjungsari.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Ahsin Aligori.



**Grafik 14: Pengambil Keputusan Dukungan Riset**



persen responden menjawab pengambilan keputusan dilakukan melibatkan tim panelis dan dewan pakar atau ahli dalam sebuah rapat bersama.

### M. Atmosfer dan Kiprah Dukungan Filantropi Riset

Meski atmosfer riset kian bergairah, namun belum menyentuh aspek yang terkait kekeluasaan skema pendanaan riset. Banyak lembaga riset kesulitan mengakses dana penelitian. Dalam konteks ini, pemerintah baru sebatas memprioritaskan tenaga peneliti dari perguruan tinggi. Ada pula peneliti yang berlabuh di unit-unit litbang di berbagai kementerian dengan justifikasi untuk memperoleh dukungan pemerintah. Dengan kata lain, belum ada sinergi di antara lembaga riset baik bersumber APBN maupun dibiayai swasta.

Dari studi ini diketahui bahwa ada skema pendanaan riset dari filantropi yang mempertimbangkan unsur kemanusiaan dan investasi pengembangan sosial. Lebih jauh lagi, studi ini menunjukkan ada alokasi anggaran lembaga filantropi yang dikhususkan untuk dukungan riset dengan jumlah yang cukup besar dan bervariasi (Grafik 4).

Walaupun telah ada kesadaran mengenai pentingnya dukungan pendanaan riset di kalangan lembaga filantropi, namun belum ada pola yang baku, yang dijadikan standar bersama untuk mengucurkan dana untuk riset yang dilakukan sendiri atau lembaga mitranya. Dukungan riset biasanya berbentuk dana atau

uang. Tapi ada juga yang berupa fasilitas lain dibutuhkan dalam riset. Contohnya material riset, pemakaian laboratorium beserta perlengkapan di dalamnya (PT Indofood Sukses Makmur), asistensi teknis dan konsultasi (YAPPIKA), hingga pemberian data yang tidak bersifat *confidential* (SMRC).

Melihat besaran anggaran tadi, skema pendanaan riset sudah terlihat. Kebanyakan riset yang didukung merupakan penelitian awal sebelum menjalankan program atau aktivitas sosial lembaga filantropi. Pada praktiknya, lembaga filantropi telah melakukan survei data dasar atau penilaian sebelum memutuskan untuk melaksanakan program mereka.

Dilihat dari sumber dananya, pendanaan lembaga filantropi dalam studi ini juga berasal dari sumber yang beragam. Lembaga filantropi berbasis perusahaan biasanya berasal dari keuntungan yang diperoleh perusahaan. Ada juga yang memberikan dukungan riset dari dana operasional perusahaan.

Pendanaan riset lembaga filantropi intermediari berasal dari sejumlah sumber. Pertama, untuk lembaga filantropi intermediari berbasis LSM, biasanya berasal dari donor internasional, *internal endowment*, atau kemitraan lainnya. Kedua, untuk lembaga filantropi intermediari berbasis keagamaan, jamaknya berasal dari dana *endowment* atau wakaf, sedekah, infak, hingga donasi individu atau lembaga. Adapun sumber dukungan lembaga filantropi keluarga biasanya berasal dari dana pribadi dan dana keluarga pendirinya.

Dilihat dari riset yang telah berjalan, tema atau isu riset yang didukung lembaga filantropi (Grafik 5) meliputi:

- Tema sosial dan ekonomi.
- Tema sains dan teknologi.
- Tema riset yang berhubungan dengan kepentingan atau kebutuhan lembaga filantropi pendukung riset.
- Tema terkait dengan kemanusiaan dan budaya.
- Isu atau tema spesifik seperti isu lingkungan, kesehatan dan gizi, literasi

keuangan, dan evaluasi program lembaga.

Dalam wawancara, sejumlah lembaga filantropi mengatakan secara spesifik tema riset yang didukung dan menjadi prioritas lembaga. Yayasan Unilever menyebutkan riset tentang kedelai hitam, riset tentang sampah, riset dampak bisnis unilever terkait dengan dampak lingkungan, riset untuk mendukung bisnis utama unilever, hingga evaluasi program. Sementara Citi Peka Indonesia pernah membuat riset tentang pemberdayaan remaja hingga pelayanan publik. Adapun Adaro pernah melakukan riset pemetaan

sosial

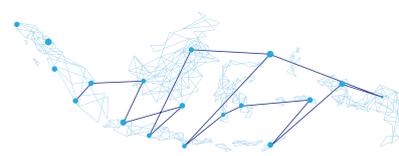
Dari penjelasan di atas, tergambar kiprah lembaga-lembaga filantropi yang turut berkontribusi dalam mendukung riset. Berikut ini adalah kiprah atau peran yang dimainkan oleh lembaga filantropi terkait dengan dukungan riset.

### ***Pendukung Riset yang Potensial***

Lembaga filantropi dengan beragam latar belakang yang tercakup pada studi ini telah menjadikan riset sebagai bagian penting dan tidak terelakkan guna mendukung aktivitas

**Tabel 1: Motif Dukungan Lembaga Filantropi Terhadap Riset**

Nama Lembaga	Motif Dukungan Riset		Sasaran Pelaksana Riset				
	Kepentingan Organisasi	Dukungan Program	Individu	LSM	LAZ	Univer-sitas	Lainnya
Yayasan Unilever	X		X	X	X	X	
Eka Tjipta Foundation		X	X				
Yayasan Buddha Tzu Chi		X	X				
Dompet Dhuafa	X	X	X	X	X	X	
CSR PT Adaro Energy	X	X		X		X	
Tanoto Foundation		X				X	
Pertamina Foundation		X	X	X		X	
KEHATI		X		X		X	
CT Arsa Foundation		X	X				
HDI Foundation		X		X			
Rumah Zakat	X	X	X		X		
LAZISMU	X	X			X	X	
Indonesia Danone Institute		X	X				
BAZIS DKI		X	X				
Baitul Maal Hidayatullah		X	X				
PKPU	X						X
The Habibie Center		X	X	X	X	X	
Yayasan Danamon Peduli	X					X	
PT Indofood Sukses Makmur	X	X	X			X	X
CSR Aqua Danone	X		X	X		X	X
BAZNAS		X	X	X	X	X	
YAPPIKA		X					X
ACT	X					X	X
Yayasan Baitul Hikmah El Nusa		X	X			X	
Citi Pekka		X		X		X	
SEAMOLEC		X	X			X	X
Yayasan Tahija		X		X		X	
Indonesia Business Links	X			X			



mereka. Pada hampir semua program dan bidang yang menjadi fokus lembaga filantropi diperlukan riset. Beberapa lembaga bahkan menjadikan riset sebagai dasar bagi pengembangan visi-misi dan kebijakan lembaga tersebut. Misalnya di Tahija Foundation, Dompot Dhuafa, YAPPIKA, dan Citi Peka Indonesia. Selain menjadikan riset sebagai salah satu acuan dalam pengambilan kebijakan di organisasi, mereka pun mendukung riset melalui pemberian dana kepada individu atau lembaga riset. Bentuk bantuan riset secara langsung diberikan, antara lain, Eka Tjipta Foundation, Danone Research Institute, dan Yayasan Baitul Hikmah El Nusa.

### ***Pelaku dan Konsultan Riset***

Studi ini mendapatkan temuan unik bahwa ada lembaga filantropi yang juga melaksanakan riset. Hal ini setidaknya ditemukan di Anwar Muhammad Foundation. Agak berbeda dengan lembaga filantropi lainnya yang memberikan mandat riset sepenuhnya kepada pihak ketiga, Anwar Muhammad Foundation juga berperan sebagai pelaku riset. Anwar Muhammad Foundation menjadikan riset sebagai salah satu program lembaga dan terbuka terhadap pendanaan dari perusahaan untuk melakukan riset. Dalam implementasinya, Anwar Muhammad Foundation bekerja sama dengan perguruan tinggi lokal untuk penggalian data. Ketika melakukan analisis data, yayasan membuat tim khusus untuk mengerjakannya. Contoh lainnya adalah Dompot Dhuafa, yang selain memberikan pendanaan riset untuk peneliti eksternal, juga melakukan riset sendiri oleh Divisi Litbang. Juga, Institute Management Zakat sebagai lembaga jejaring yang melakukan riset kebutuhan lembaga.

Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa selama ini lembaga filantropi telah berkontribusi bagi pengembangan riset di Indonesia sebagai pemberi dana, konsultan, dan bahkan pelaksana riset.

# Peta Lembaga Riset di Jabodetabek

Lembaga riset di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dalam studi ini dipetakan berdasarkan isu utama riset yang diusungnya, jenis layanan risetnya, dan kategori lembaganya. Selanjutnya, objek penelitian dibagi dalam kategori keilmuan dan riset yang dilakukan. Studi kemudian menelusuri sumber pendanaan lembaga riset, jumlah pengelolaan dana setiap tahun, dan bentuk bantuan. Cara mendapatkan dana riset juga menjadi perhatian. Studi ini mengupas bagaimana lembaga riset mendapatkan pendanaan dan informasi peluang pendanaan.

Lembaga riset yang menjadi sampel pada studi ini adalah mereka yang memiliki kegiatan riset. Lembaga ini berasal dari kalangan

akademik seperti LPPM atau lembaga riset perguruan tinggi, dan LSM yang memiliki divisi riset atau LSM yang merupakan lembaga riset. Sampel studi lainnya adalah lembaga riset profit (perusahaan riset).

## A. Profil Lembaga Riset

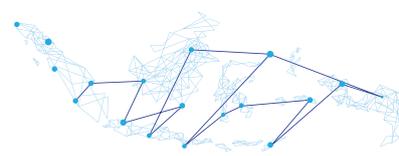
Lembaga riset yang menjadi objek studi ini terbagi ke dalam tiga kategori, yakni lembaga riset berbasis LSM, lembaga riset berbasis perguruan tinggi, dan lembaga riset profit atau komersial (**Grafik 15**).

Isu utama yang menjadi perhatian lembaga riset cukup beragam. Terkadang lembaga riset tidak hanya bergerak dalam satu bidang isu. Hal ini menyebabkan pilihan bidang isu lembaga jumlahnya melebihi angka sampel. Bidang isu yang diminati oleh lembaga riset adalah pendidikan, pemberdayaan masyarakat, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Bidang lain yang juga menjadi isu utama adalah politik. Beberapa lembaga riset menempatkan diri mereka sebagai konsultan politik (**Grafik 16**).

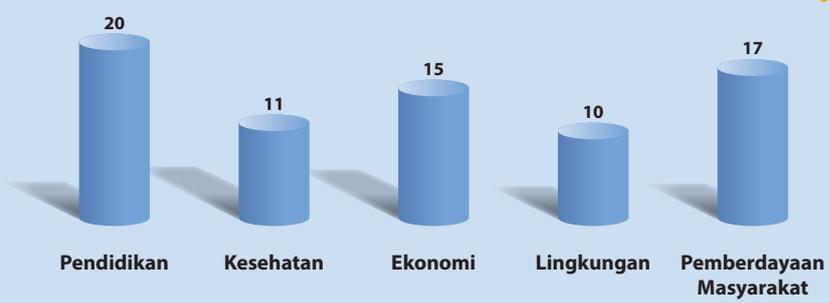
Isu yang muncul dalam program-program mereka adalah perlindungan konsumen, *good governance*, pemberdayaan perempuan, politik, hukum, dan keagamaan (seperti kampanye nilai agama dan toleransi

**Grafik 15: Responden Lembaga Riset**





**Grafik 16: Bidang dan isu Utama Lembaga Riset**

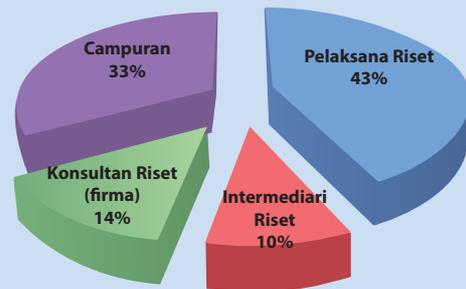


beragama). Ada juga anggaran negara, kebijakan publik, opini publik, manajemen pelayanan publik, transparansi, teknologi informasi, industri kreatif, buruh migran, ekonomi makro, industri perdagangan, pemasaran, media, dan budaya.

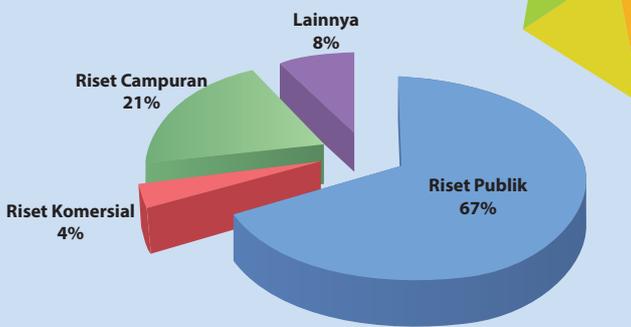
Apabila dilihat dari isu utama lembaga riset tadi dan jenis lembaga risetnya, tampak bahwa penelitian yang menjadi layanan lembaga adalah riset publik atau riset yang bersentuhan dengan masyarakat luas (**Grafik 17**).

melaksanakan riset sejak dari penyusunan desain penelitian, pengambilan data, sampai analisis dan pelaporan. Lembaga pelaksana riset mengelola seluruh aktivitas riset agar

**Grafik 18: Kategori Lembaga Riset**



**Grafik 17: Jenis Layanan Riset**



proses penelitian sesuai dengan metode yang sudah ditetapkan.

Lembaga konsultan riset kerap berbentuk firma. Lembaga ini berperan sebagai konsultan yang bertugas untuk memberikan arahan, masukan, pendampingan, dan konsultasi terkait dengan bidang tertentu. Mereka juga menggunakan riset sebagai saran untuk kliennya.

Layanan riset yang berasal dari responden perguruan tinggi umumnya adalah riset akademik. Untuk lembaga riset profit, mereka memberikan layanan riset pasar dan politik. Adapun, LSM memberikan layanan terkait dengan isu-isu perburuhan, konsumen, regulasi, dan riset sejenis yang sesuai dengan bidang dan isu utama lembaganya.

Beberapa perusahaan konsultan memiliki spesialisasi tertentu. Ada yang berkonsentrasi pada bidang pemasaran atau teknologi informasi, ada pula yang memfokuskan diri hanya pada industri perbankan dan jasa keuangan. Beberapa lembaga konsultan menganalisis situasi nasional dan sebagian lainnya memberikan berbagai arahan untuk menyikapi perkembangan politik. Biasanya,

Kategori lembaga riset yang terangkum dalam studi ini cukup beragam (**Grafik 18**). Lembaga pelaksana riset biasanya

lembaga riset seperti ini hanya terdiri dari beberapa orang saja. Namun, ada juga lembaga konsultan yang memiliki cukup banyak staf untuk memenuhi kebutuhan kerja riset mereka.

Lembaga intermediari atau perantara riset adalah lembaga yang mendapatkan dukungan pendanaan dari pihak lain, yang umumnya berasal dari donor Internasional, dan kemudian menyalurkannya lagi ke organisasi lain untuk kegiatan riset. Lembaga intermediari ini juga melakukan subkontrak atau melimpahkan kerja riset ke lembaga lain. Ada sejumlah mekanisme dalam pelaksanaan riset lembaga intermediari. Pertama, lembaga secara langsung memberikan dana riset ke lembaga lain yang menjadi mitranya untuk riset yang diajukan. Lembaga mitra tidak hanya sebagai pelaksana riset, tapi juga pengelola dana riset. Kedua, lembaga intermediari melaksanakan riset dengan merekrut tenaga peneliti dari lembaga mitra. Untuk yang terakhir ini, lembaga mitra tidak mengelola dana riset, tapi hanya diberi alokasi pendanaan sesuai kebutuhan riset. Semua dana dikelola oleh lembaga intermediari. Ketiga, lembaga intermediari dan mitranya melakukan riset kolaborasi dengan pendanaan riset dikelola secara bersama.<sup>30</sup>

## B. Kategori Riset

Lembaga riset yang menjadi objek penelitian pada studi ini dikelompokkan ke dalam dua

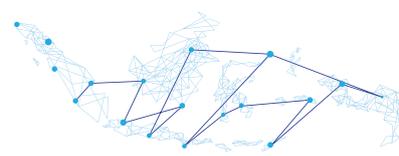
kategori. Pertama, kategori keilmuan atau latar belakang keilmuan yang mendasarinya. Kedua, kategori penelitiannya.

Berdasarkan kategori keilmuan, riset yang dilakukan oleh lembaga riset yang menjadi sampel studi ini sebagian besar adalah penelitian ilmu sosial (**Grafik 19**). Pilihan penelitian lembaga riset bisa lebih dari satu kategori. Misalnya, satu lembaga riset melakukan penelitian ilmu sosial sekaligus penelitian ilmu terapan.

Dilihat dari kategori penelitian, riset yang banyak dilakukan adalah penelitian terapan (**Grafik 20**). Penelitian dasar (*basic research*) sering disebut juga penelitian murni (*pure research*) atau penelitian pokok (*fundamental research*). Penelitian dasar adalah riset yang diperuntukan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan dan diarahkan pada pengembangan teori-teori yang ada atau untuk menemukan teori baru. Peneliti yang melakukan penelitian dasar memiliki tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan tanpa memikirkan manfaat secara langsung dari hasil penelitian. Penelitian dasar memberikan sumbangan besar terhadap pengembangan serta pengujian teori yang akan mendasari penelitian terapan. Penelitian terapan atau *applied research* berhubungan dengan kenyataan-kenyataan praktis, penerapan, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan nyata. Penelitian terapan berfungsi



<sup>30</sup> Resume hasil FGD di Hotel Ibis Arcadia, Jakarta, 19 Mei 2016.



**Grafik 20: Kategori Penelitian**



untuk mencari solusi atas masalah-masalah tertentu. Tujuan utama penelitian terapan adalah pemecahan masalah, sehingga hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia secara individu atau kelompok dan untuk keperluan industri atau politik, bukan untuk wawasan keilmuan semata (Sukardi 2003).

Beberapa riset pengembangan lembaga yang menjadi sampel studi ini adalah penelitian aksi, hingga penelitian kebijakan dan implementasinya di lapangan.

### C. Dukungan dan Sumber Pendanaan

Pendanaan lembaga riset bersumber dari berbagai pihak, baik institusi maupun individu. Sumber pendanaan ini sering kali terkait dengan bentuk layanan dan pola kemitraan lembaga riset. Beberapa sumber pendanaan (**Grafik 21**) yang bisa dicatat dalam studi ini adalah:

- 1. Donor internasional.** Sumber pendanaan ini banyak diakses oleh lembaga riset berbasis LSM. Mereka sering bekerja sama dengan donor internasional terkait dengan program tertentu yang dalam kerjanya melakukan aktivitas riset. Biasanya penelitian tersebut merupakan riset aksi atau riset kebijakan.
- 2. Perusahaan.** Sumber pendanaan ini kerap diakses oleh lembaga riset profit. Perusahaan memiliki karakter melakukan kerja sama dengan perusahaan atau kalangan profesional lainnya. Sehingga, saat akan bekerja sama dengan LSM, maka pilihannya jatuh pada LSM yang

telah memiliki kredibilitas tinggi dan dikelola secara profesional. Selain oleh lembaga riset profit, dana perusahaan sering juga diakses oleh perguruan tinggi dan akademisi. Namun, sering kali pihak perusahaan yang lebih aktif mendekati perguruan tinggi dibandingkan sebaliknya. Kepentingan akademik terkait riset inilah yang melatarbelakangi perusahaan untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi.

- 3. Pemerintah.** Sumber pendanaan ini sering diakses oleh perguruan tinggi. Dana pemerintah ini biasanya disalurkan ke perguruan tinggi dengan anggapan bahwa lembaga ini memiliki mandat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Keberadaan perguruan tinggi memang selalu berhubungan dengan pengembangan riset. Belakangan, pendanaan pemerintah juga bisa diakses oleh LSM dalam bentuk kerja kolaborasi dan konsultasi.

- 4. Yayasan Nasional.** Sumber pendanaan ini bisa diakses oleh siapa saja. Yayasan nasional bisa berupa yayasan keluarga, yayasan keagamaan, dan yayasan sosial kemanusiaan lainnya. Biasanya yayasan nasional membutuhkan mitra dalam melakukan riset untuk kebutuhan lembaga. Sebagian yayasan berkontribusi pada riset di luar kebutuhan lembaganya seperti yang dilakukan oleh Yayasan Tahija.

Terkadang pendanaan lembaga riset tidak hanya berasal dari satu sumber. Banyak lembaga riset yang memiliki beragam sumber pendanaan seperti YLKI. Lembaga ini mendapatkan dana riset dari pemerintah,

**Grafik 21: Sumber Pendanaan Lembaga Riset**



donor internasional, dan publik.

Dari berbagai sumber pendanaan, beberapa lembaga riset mengelola dana penelitian lebih dari Rp 1 miliar per tahun (**Grafik 22**). Keragaman sumber dana, intensitas kegiatan, dan cakupan riset memengaruhi jumlah dana riset yang dikelola setiap tahun.

Bila dirata-ratakan, jumlah dana riset di 28 lembaga yang menjadi responden mencapai Rp 25,488 miliar per tahun. Sedangkan potensi dukungan filantropi untuk riset mencapai Rp 1,025 triliun tiap tahun.

Lembaga yang mengelola dana kurang dari Rp 100 juta di antaranya adalah Universitas Matana, Maarif Institute, ASPPUK, dan TURC. Sedangkan lembaga yang mengelola dana Rp 100 juta hingga Rp 500 juta di antaranya adalah Charta Politika, Bina Swadaya, Universitas Paramadina, Laborarium Fisika Media, Center for Indonesia Policy Studies, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, INFID, Yayasan Jurnal Perempuan, Elsam, LSP, Institute for Strategic Initiatives, dan PPM

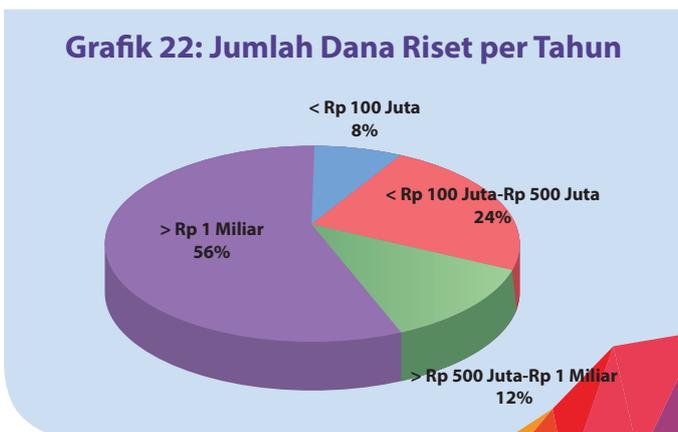
Manajemen.

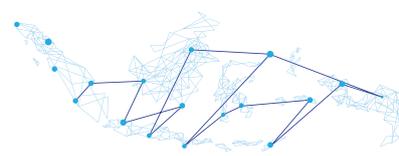
Sedangkan dana dari Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar dikelola UHAMKA, Lembaga Penelitian Pendidikan dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), CIRUS, LPPM Universitas Trilogi, LPPM UKI, CORE Indonesia, dan Indikator Politik. Adapun lembaga yang mengelola dana di atas Rp 1 miliar adalah WRI, LPPM Universitas Pelita Harapan, PSHK, PPIM UIN Jakarta, Wahid Institute, FITRA, Lab Sosio UI, PPPM Universitas Moestopo, LPPM Universitas Atma Jaya, LPPM Universitas Mercubuana, KPA, Lemit UNJ, Pattiro, dan Saiful Mujani Research & Consulting. Ada juga PPPM IPB, LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta, ICW, SMERU, IRAI, Indo Barometer, PT Sigma Research Indonesia, Mars Indonesia, LPPM Masyarakat Universitas Nasional, MRIN, dan Lembaga Pers Dr. Soetomo, serta Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat UI.

Bentuk dukungan pendanaan ini beragam. Ada yang merupakan dana hibah atau *grant*, ada yang berbentuk pinjaman, hingga ada yang berbagi keuntungan (**Grafik 23**). Untuk donor internasional bentuk bantuan pendanaan ini biasanya bersifat hibah. Adapun perusahaan ada yang berbagi keuntungan. Sedangkan pinjaman merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah. Lembaga riset mendapatkan dana talangan dari perguruan tinggi yang kemudian harus dikembalikan ketika mereka mendapatkan proyek riset dari lembaga lain.

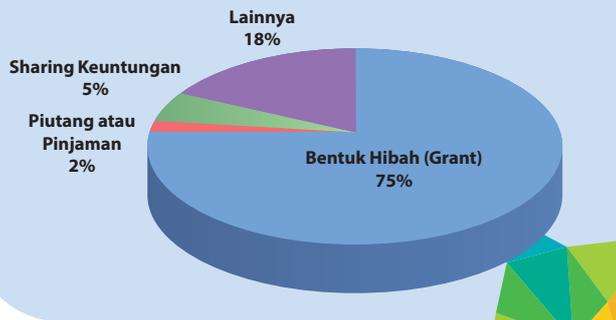
Bentuk dukungan pendanaan riset yang

**Grafik 22: Jumlah Dana Riset per Tahun**





**Grafik 23: Bentuk Dukungan Pendanaan Riset**



termasuk dalam kategori lainnya meliputi honor penelitian dan pembayaran jasa penelitian. Ini biasanya diberikan oleh perusahaan atau pengguna jasa ke lembaga-lembaga riset profit yang telah memberikan jasa penelitian. Sedangkan untuk lembaga riset LSM biasanya berupa hibah, yang kerap diberikan lembaga donor.

Lembaga donor internasional yang menjadi sumber pendanaan riset dengan bentuk hibah ini adalah Ford Foundation, USAID-Prorep, Helt Policy Plus, World Resource Institute, Ausaid, The Asia Foundation (TAF), AIPJ, Knowledge Sector Initiative (KSI), KAS, ROC, DFAT, RIH, EYED, Silicon Valley, IAEA, UN (UNICEF), OXFAM, dan AIPHSS. Selain itu, R2D Amerika, Atlas Network (USA), Danida, OXFAM, European Commission, Asian Development Bank (ADB), GRM Australia, World Bank, CLFI, Brot fuer die Welt (BFDW) Germany, WWF, DGB Bildungsweru, dan MSI Kedutaan New Zealand. Sedangkan institusi pemerintah adalah Kementristek Dikti, Kementerian Agama, Pemerintah DKI Jakarta, Mahkamah Konsitusi, TNP2K, KPPPA, NKP, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Komis Pemberantasan Korupsi.

Perusahaan yang pernah bekerja sama dalam riset dengan lembaga yang menjadi sampel studi adalah LIPPO group, Paramount Enterprise, Pertamina, Garuda Food, AMCHAM Indonesia, PTPN, PT AETRA, Agung Automall, hingga PT Angkasa Pura. Untuk individu, lembaga riset biasanya

menjalin kerja sama dengan anggota partai politik, calon kepala daerah, anggota dewan, hingga pejabat pemerintah daerah.

Bagi lembaga riset berbasis LSM, dukungan dari donor internasional masih menjadi favorit untuk diakses karena sejalan dengan visi-misi dan karakteristik LSM itu sendiri. Bantuan berupa dana hibah dengan pengelolaan yang relatif fleksibel membuat LSM lebih mudah menjalin kemitraan dengan donor internasional. Ini berbeda ketika mereka bekerja sama dengan pemerintah dan perusahaan.

Di PSHK misalnya, dukungan dana dari pemerintah dan perusahaan untuk kegiatan riset masih terbatas. Ada pola dan kepentingan yang berbeda dari pihak pemerintah. Lembaga riset punya keinginan mengembangkan sesuatu yang baru, sedangkan hal ini belum menjadi kebutuhan pemerintah karena pemerintah bekerja sesuai dengan agenda kerjanya. Inilah yang menjadi kendala dalam kerja sama lembaga riset independen dengan pemerintah.

Adapun dengan perusahaan, sering kali ada perbedaan visi-misi yang membuat kerja sama sulit dijalin. Jika perbedaan visi-misi itu cukup bertolak belakang, permintaan perusahaan untuk melakukan riset belum bisa dipenuhi. Dalam kasus PSHK, lembaga sebenarnya tidak menutup pintu terhadap kerja sama dengan perusahaan dalam melaksanakan riset. Tapi, dalam praktiknya, sering kali kerja sama dengan perusahaan membuat lembaga harus mengompromikan hasil penelitian. Hal ini membuat penelitian bisa berubah karena kepentingan pemberi dana. Selanjutnya, jika tidak ada titik temu, kerja sama semacam ini tidak mungkin dilangsungkan.<sup>31</sup>

#### **D. Metode Penggalangan dan Akses Dana Riset**

Ada beragam metode penggalangan dan riset yang dilakukan oleh lembaga riset yang menjadi sampel studi ini (lihat **Grafik 24**). Metode lain yang digunakan untuk menggalang

<sup>31</sup> Wawancara dengan M. Nur Sholikin.

**Grafik 24: Metode Penggalangan Dana Riset**



dana riset melalui donasi publik, *crowdfunding*, iuran anggota, dan pendapatan usaha seperti mendirikan sekolah, pengelolaan pelatihan, dan penjualan jasa. Lembaga yang sudah melakukan *fundraising* dengan donasi publik adalah ICW dan YLKI. Sedangkan yang mengumpulkan iuran anggota adalah LP3ES. Adapun yang menjual jasa atau mendirikan unit usaha dilakukan oleh lembaga-lembaga profit. Tapi, lembaga nonprofit seperti PSHK pun sudah membuat unit usaha untuk mendukung program riset di lembaganya. Pendirian Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera adalah upaya PSHK untuk mendukung penggalangan dana. Melalui metode inilah penghasilan pada akhirnya digunakan untuk operasional lembaga. Salah satunya, dialokasikan untuk kerja riset. Meskipun pada saat ini riset PSHK lebih sering didanai lembaga donor internasional.

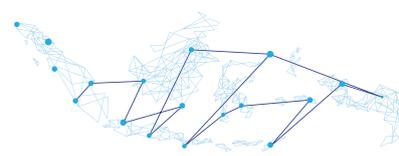
Penggalangan dana dengan memanfaatkan dukungan dari penerima manfaat dilakukan oleh SEDANE LIPS. SEDANE merupakan lembaga yang berfokus pada isu buruh.

Lembaga ini bekerja sama dengan serikat-serikat buruh. Pendanaan yang diperoleh SEDANE memang tidak sebesar pendanaan lembaga-lembaga riset lain yang mendapatkan dukungan donor internasional, pemerintah, atau sektor privat. Keberlanjutan program riset lembaga ini didanai oleh serikat buruh.

Pengembangan riset yang bersifat idealis dilakukan oleh PPM Manajemen. Pendanaan riset selama ini memang lebih merupakan pekerjaan yang didistribusikan oleh perusahaan tertentu. Namun, pada perkembangannya, PPM menciptakan topik-topik riset pengembangan ilmu berdampingan dengan riset yang dipesan klien perusahaan. Hal serupa juga sedang diinisiasi lembaga jaringan bernama *Policy Research Network*. Jaringan ini merekomendasikan penelitian kebijakan terhadap sektor privat demi kepentingan perusahaan. Beberapa lembaga riset masih mengandalkan riset *call for proposal* dari donor internasional, pemerintah, dan sektor privat, sesuai dengan isu dan fokus lembaga tersebut.

**Grafik 25: Cara Mendapatkan Informasi Peluang Riset**





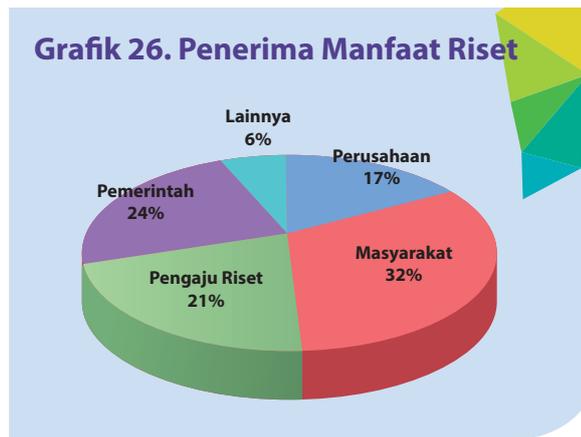
Lembaga riset yang menjadi sampel survei punya berbagai cara dalam mengakses informasi dukungan pendanaan atau peluang riset (**Grafik 25**). Caranya antara lain dengan mencermati panggilan proposal terbuka (*call for proposal*) di internet, koran, dan surat elektronik yang dibagikan dari penyedia informasi terkait (misalnya Jobsdev). Terkadang mereka mendapatkan dukungan lewat penunjukan oleh lembaga tertentu dan informasi dari kolega.

Pola kerja sama biasanya ditentukan setelah mendapatkan hibah dari pengajuan proposal atau mitra sindikasi. Ada sejumlah lembaga yang mendapatkan pendanaan proyek berdasarkan kurun waktu tertentu. Contohnya, lembaga riset SMERU yang pernah mendapatkan pendanaan riset selama tiga tahun. Namun, banyak lembaga yang mendapatkan pendanaan hanya per proyek penelitian. Hal ini disampaikan Women Research Institute yang mengkhawatirkan kelangsungan proyek penelitian. Ada kecenderungan ketika proyek penelitian selesai, hasilnya hanya berupa laporan dan tidak dikembangkan menjadi program yang lebih tepat guna sesuai rekomendasi penelitian.<sup>32</sup>

#### E. Penerima Manfaat Riset

Hasil penelitian lembaga riset bermanfaat tidak hanya untuk lembaga riset itu sendiri, tapi juga untuk masyarakat, perusahaan atau lembaga, pemerintah, dan objek dari penelitian tersebut (**Grafik 26**).

Manfaat penelitian bagi masyarakat di antaranya adalah meningkatkan pengetahuan. Misalnya, ketika ada isu menggemparkan mengenai kandungan melamin dalam susu, YLKI melakukan riset terkait dengan isu ini. Riset dilakukan untuk menjawab keraguan yang muncul di masyarakat. Hasil penelitian nantinya dinilai masyarakat. Hal ini memunculkan kebutuhan untuk melaksanakan riset. Penelitian ini bermanfaat untuk mengedukasi konsumen dan melakukan



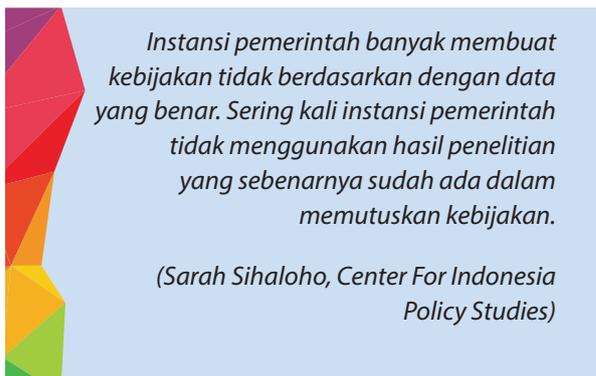
advokasi kebijakan.<sup>33</sup>

Ihwal advokasi kebijakan, aktor yang berperan penting dalam perubahan kebijakan adalah pemerintah. Tak heran bila pemerintah berada di urutan kedua penerima manfaat riset. Dalam kerja advokasi, penelitian merupakan upaya awal dalam mengidentifikasi masalah. Penelitian bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembuat keputusan guna memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengomunikasikan kebijakan. Hasil penelitian menjadi landasan dalam pembuatan kebijakan. Masukan dari hasil riset dapat berupa rekomendasi atau temuan baru dalam penyusunan program pembangunan.

Penelitian tersebut dilakukan sebelum program pembangunan dilaksanakan di masyarakat. Tapi proses penelitian tidak berhenti sampai di sana. Penelitian harus dilakukan sebelum program pembangunan diimplementasikan, ketika program dilaksanakan, dan sesudah program dilakukan. Ketika program berjalan, penelitian harus terus dilakukan untuk menganalisis keunggulan dan kelemahan, serta efektivitas dan relevansi program. Jika ada hambatan selama program pembangunan dilaksanakan, penelitian dapat mengetahui penyebabnya sehingga segera dicari jalan keluarnya. Setelah program selesai, selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mempelajari dampak program tersebut. Suatu program dikatakan berhasil jika memberikan manfaat bagi masyarakat, yakni meningkatkan kualitas hidup manusia.

32 Wawancara dengan Ayu Anastasia.

33 Wawancara dengan Sudaryatmo.



Dalam kasus Indonesia, ketika FGD lembaga riset, terungkap bahwa banyak program pembangunan yang salah arah dan salah tujuan. Dari beberapa penyebab kegagalan program pembangunan di Indonesia, salah satunya adalah tidak adanya dukungan data penelitian yang valid bagi setiap program pembangunan. Sehingga, ketika diterapkan di lapangan banyak program pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> FGD di Hotel Ibis Arcadia, Jakarta, 19 Mei 2016.

# Peluang dan Tantangan Filantropi Riset di Indonesia

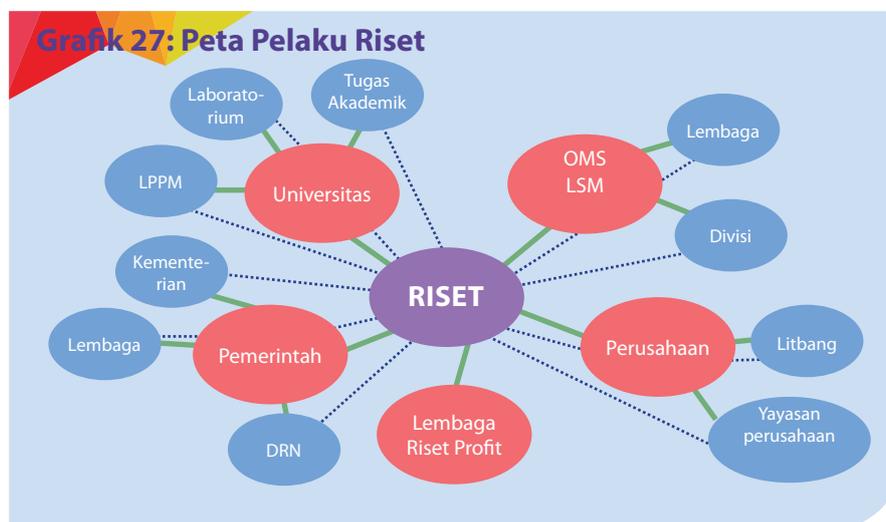
Indonesia memiliki potensi untuk menjadikan riset sebagai penggerak utama sekaligus fondasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta penciptaan inovasi baru. Peluang besar tersedia karena masih banyaknya masalah yang dihadapi masyarakat sipil, pemerintah, dan sektor privat, yang membutuhkan solusi untuk mengentaskan masalah.

## A. Peluang Dukungan Filantropi Riset di Indonesia

Beragam institusi riset tumbuh tidak hanya di pemerintah, tapi juga swasta dan masyarakat sipil. Dalam pemerintahan, hampir setiap kementerian dan lembaga memiliki lembaga riset. Di perguruan tinggi ada lembaga

penelitian dan pengembangan masyarakat. Belum lagi riset laboratorium, skripsi, disertasi, dan tesis yang dibuat oleh mahasiswa. Di ranah masyarakat sipil, LSM juga mengembangkan divisi riset. Sektor swasta, yakni perusahaan, memiliki divisi litbang selain mengembangkan lembaga pendukung riset di luar perusahaan. Ada juga perusahaan yang dibentuk sebagai lembaga riset dan menawarkan jasa riset.

**Grafik 27** memperlihatkan bahwa pelaku riset dilakukan oleh perguruan tinggi, pemerintah, lembaga riset profit, perusahaan, dan LSM. Perguruan tinggi melakukan riset dalam tugas akademik, LPPM, dan laboratorium. Di pemerintah, riset dilakukan



oleh kementerian dan lembaga, dan Dewan Riset Nasional (DRN). Sementara perusahaan, riset dilakukan oleh yayasan perusahaan dan divisi litbang perusahaan. Adapun di LSM, riset melekat di divisi. Beberapa LSM bahkan menfokuskan diri di bidang riset. LSM di sini

*Di Indonesia banyak sekali riset yang dilakukan. Sayangnya, hasil riset ini tidak banyak dipublikasikan sehingga tidak bisa diakses oleh publik dan memberikan manfaat bagi publik. Berangkat dari kondisi ini, Yayasan Institute Danone Indonesia berupaya untuk meningkatkan capacity building bagi researcher di Indonesia agar dapat memublikasikan risetnya. Komitmen ini selaras dengan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi lembaga akademik dan penelitian terkemuka di Indonesia. Strategi kami adalah dengan mengembangkan hibah penelitian bagi seluruh lembaga perguruan tinggi dan individu untuk mengembangkan riset di Indonesia.*

*(Rizki Pohan, General Secretary Yayasan Institute Danone Indonesia)*

mencakup badan hukum yayasan dan perkumpulan atau perhimpunan.

Berkembangnya lembaga riset di Indonesia merupakan modal untuk mengembangkan riset-riset inovatif yang dibutuhkan untuk pembuatan kebijakan dan mengatasi persoalan di masyarakat. Potensi ini tidak hanya dilihat dari kuantitas lembaga riset, tapi juga upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk mendukung dunia riset melalui kebijakan dan dana. Berdasarkan wawancara dengan Anwar Muhammad Foundation, kebijakan pemerintah<sup>35</sup> dan organisasi internasional pemberi dana yang mewajibkan adanya kajian mendalam tentang dampak dari proyek-proyek pembangunan, telah menggeliatkan sektor privat untuk melakukan kajian melalui riset mengenai dampak dari proyek usaha. Kecenderungan riset yang dilakukan berupa

*baseline survey* terhadap masyarakat sekitar proyek, pemetaan para pemangku kepentingan, dan penilaian terhadap risiko sosial dan dampak lingkungan. Pemberlakuan UU Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 mendorong pemerintah mereformasi aparatur negara dengan dukungan kebijakan berbasis data melalui Lembaga Administrasi Negara (LAN). Sehingga, adanya kebutuhan untuk melakukan penelitian bisa diakomodasi. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan alokasi anggaran untuk melaksanakan penelitian (Sherlock dan Djani 2015).

Dalam FGD yang diselenggarakan oleh PIRAC, terungkap bahwa dana yang dikelola oleh Universitas Nasional untuk penelitian per tahun mencapai Rp 3 miliar rupiah. Pada 2016, jumlah itu meningkat menjadi Rp 5 miliar. Sedangkan dana riset yang dikelola oleh UI pada 2016 mencapai Rp 15 miliar.<sup>36</sup>

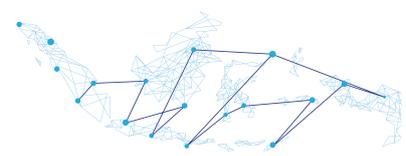
Adapun realisasi APBN Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada 2015 per 30 November 2015 sebesar 61,95 persen atau senilai Rp 27,3 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp 44 triliun. Karena tidak terserap secara maksimal, pagu anggaran kementerian ini pada 2016 berkurang menjadi Rp 40,63 triliun. Sebesar Rp 39,66 triliun ditujukan bagi pendidikan tinggi seperti beasiswa mahasiswa dan dosen, biaya operasional perguruan tinggi negeri, dan program prioritas lainnya. Sementara Rp 0,97 triliun digunakan untuk layanan umum, termasuk prototipe laik industri, sentra hak kekayaan intelektual, dan produk inovasi. Terlihat jelas bahwa anggaran tersebut sebagian besar untuk keperluan perguruan tinggi, bukan riset.<sup>37</sup>

Keterbatasan anggaran riset Indonesia memang berimbas pada perkembangan riset di Indonesia. Namun, di sisi lain justru mendorong lembaga filantropi untuk berperan dalam dunia riset. Keterbatasan anggaran pemerintah memaksa pelaku riset untuk

<sup>35</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

<sup>36</sup> Nonon Sarabinon, disampaikan dalam FGD di Hotel Ibis Arcadia, Jakarta, 19 Mei 2016.

<sup>37</sup> Kompas, 21 Januari 2016.



menggali potensi dukungan riset dari berbagai sumber, salah satunya dari lembaga filantropi.

Lembaga filantropi sangat berkepentingan karena riset menjadi landasan untuk perencanaan dan pengembangan program lembaga filantropi. Ada beragam skema kegiatan riset yang dapat dikerjasamakan dengan lembaga filantropi dengan berbagai model kerja sama. Lembaga filantropi pun memiliki latar belakang beragam dalam mendukung riset. Misalnya, Yayasan Institute Danone Indonesia yang merasa prihatin terhadap minimnya publikasi riset, sehingga mengalokasikan hibah penelitian melalui kompetisi agar muncul publikasi riset yang aplikatif.<sup>38</sup>

Di Danone, selain Yayasan Institute Danone Indonesia, dukungan riset dilakukan melalui mekanisme kerja sama profesional dengan lembaga penelitian untuk mengelola riset yang dibutuhkan perusahaan. Bagi lembaga riset, kontribusi besar yang diberikan oleh Yayasan Institute Danone Indonesia di antaranya berupa peningkatan kapasitas, pendampingan, dan asistensi teknis, dan *monitoring* riset. Danone terbuka untuk kerja sama dengan LSM, perguruan tinggi, lembaga riset profesional, dan individu untuk meneliti hal-hal yang dibutuhkan oleh perusahaan. Budaya riset sudah menjadi kebijakan dalam mengoperasikan perusahaan Danone. Ketika akan membuka pabrik di sebuah wilayah misalnya, Danone akan melakukan pemetaan sosial. Demikian juga ketika mengembangkan produk baru atau saat memenuhi kebutuhan perusahaan lainnya.

Riset juga menjadi budaya di Unilever. Sebagaimana Danone, Unilever memiliki kepentingan terhadap riset. Hal yang melatarbelakangi Yayasan Unilever dan perusahaan Unilever mendukung riset adalah kebutuhan dan prioritas bisnis. Menemukan produk baru yang lebih hemat air misalnya, bisa memengaruhi praktik penggunaan air. Riset sosial pun dikaitkan dengan kebutuhan perusahaan. Misalnya, riset yang terkait

dengan perilaku konsumen dan tren penggunaan internet di kalangan ibu-ibu untuk dipelajari guna mempromosikan produk baru. Dari riset ini pula Unilever melakukan inovasi

*Sejak 1998, Indofood memulai dengan sayembara riset secara umum. Namun, selama 10 tahun, jumlah proposal yang masuk masih minim. Kemudian pada tahun 2000-an, Indofood memulai kompetisi berupa call for proposal ke kampus-kampus dengan memperbanyak poster, iklan di koran, dan seminar dalam rangka sosialisasi program kompetisi tersebut. Selain dukungan pendanaan, Indofood men-support fasilitas berupa penggunaan laboratorium, penyediaan material, dan bahan baku penelitian, serta asistensi dari dewan pakar independen yang direkrut oleh Indofood.*

*(Deni Puspahadi, Corporate Communication Manager PT Indofood Sukses Makmur)*

produk. Misalnya, ketika banyak perempuan menggunakan hijab dan muncul fenomena “*hijaber*”, dengan kondisi Indonesia yang memiliki tingkat kelembapannya tinggi, dibutuhkan inovasi untuk membuat sampo yang membuat rambut tidak lepek meski selama 12 jam lebih memakai hijab.<sup>39</sup>

Dukungan riset juga diberikan PT Adaro Energy melalui program CSR dan Yayasan Adaro Bangun Negeri. Yayasan ini memiliki program beasiswa untuk anak dhuafa dan anak berprestasi. Ada juga beasiswa utusan daerah hasil kerja sama dengan IPB. Di bidang pendidikan, ada *project base education* yang melatih siswa SMA untuk memiliki keterampilan membuat makalah, berpikir kritis, dan komunikasi. Pada akhir program, peserta didik diminta untuk melakukan riset dengan pendanaan yang telah disiapkan. Setiap tahunnya, Adaro mendanai lebih dari 20 riset aplikatif. Lembaga ini juga memiliki program olimpiade sains di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.<sup>40</sup> Salah satu hasil riset terbaiknya

38 Wawancara dengan Rizki Pohan.

39 Wawancara dengan Waila Wisjnu.

40 Ghufon Solikhin dalam FGD 19 Mei 2016.

adalah mengolah nasi basi menjadi bahan penggumpal karet. Riset ini memenangi kompetisi dan dipresentasikan ke pemerintah daerah yang sedang membuat bahan penggumpal karet. Untuk kepentingan Adaro sendiri, ketika akan melaksanakan program CSR, ada pemetaan sosial.<sup>41</sup>

Dukungan riset dengan mekanisme kompetisi ini dilakukan oleh PT Indofood dengan program Indofood Riset Nugraha. Setiap tahun secara reguler Indofood menggelar kompetisi di kalangan akademisi dengan dukungan dana Rp 2- 3 miliar.<sup>42</sup>

Selain dari perusahaan dan yayasan perusahaan, peluang dukungan untuk riset ini datang dari yayasan keluarga. Beberapa yayasan keluarga biasanya didirikan oleh CEO atau pemilik perusahaan, sehingga beberapa yayasan keluarga memiliki karakteristik yang sama dengan perusahaan. Yayasan keluarga yang memiliki perhatian dalam pengembangan riset ini di antaranya adalah Tahija Foundation dan Anwar Muhammad Foundation.

Yayasan keluarga ini mendukung riset sebagai kebutuhan yang lebih luas, tidak hanya untuk internal kelembagaan. Contohnya Tahija Foundation yang mendukung penelitian mengenai pola perkembangan nyamuk penyebab demam berdarah. Yayasan Tahija berkolaborasi dengan Universitas Gadjah Mada dan Monash University Australia melakukan riset *Eliminate Dengue Project* di Yogyakarta. Penelitian tersebut mengembangkan metode alamiah untuk mengurangi penyebaran virus demam berdarah dengan menggunakan bakteri alami yang disebut *Wolbachia*. Jika berada dalam tubuh nyamuk *Aedes Aegypti*, bakteri bisa menekan virus demam berdarah sehingga tidak menular ke manusia.<sup>43</sup>

Lain halnya dengan riset Anwar Muhammad Foundation. Yayasan mendukung riset yang terkait kehidupan berkelanjutan di sekitar lokasi proyek pembangunan dengan cakupan

riset di seluruh Indonesia. Anwar Muhammad Foundation kerap bekerja sama dengan perguruan tinggi lokal untuk melaksanakan riset bersama. Salah satu yang pernah dilakukan adalah penilaian kehidupan berkelanjutan yang dikembangkan dengan menggunakan teori Kerangka Penghidupan Berkelanjutan oleh Chambers dan Conway. Pendekatan ini sering digunakan untuk proyek yang dibangun oleh korporasi sebagai data awal (*social baseline*) untuk melakukan analisis dampak proyek dan penyusunan rencana program pengembangan masyarakat.

Lembaga filantropi lainnya yang mendukung riset ini adalah organisasi intermediari seperti lembaga keagamaan dan LSM. Yayasan berbasis keagamaan seperti lembaga pengelola zakat biasanya menggunakan riset untuk pemetaan potensi zakat dan mengenal pola perilaku donatur. Selain untuk kebutuhan internal organisasi, lembaga intermediari juga melakukan riset agar layanan yang mereka berikan lebih optimal diterima oleh penerima manfaat program.

Berbeda dengan lembaga berbasis keagamaan, lembaga intermediari seperti Yappika, KEHATI, dan Indonesia Business Links mendukung riset untuk kepentingan publik yang lebih luas. Biasanya, hasil dari riset ini untuk kebutuhan advokasi kebijakan. Pola kemitraan untuk riset ini pun beragam. Sebagai penyalur dana ke lembaga lain, dalam pelaksanaan riset terkadang tidak hanya memberikan dukungan dana, tapi juga pendampingan dan kolaborasi. Yappika dan KEHATI memiliki pola kemitraan yang mirip.

Ada tiga pola dalam melakukan riset, yaitu merekrut peneliti lokal dari organisasi mitra dengan pengelolaan dana tetap ditangani oleh lembaga intermediari, memberikan hibah riset untuk mitra dengan pendanaan ditangani oleh mitra, dan melakukan kolaborasi riset dengan pendanaan dan pelaksanaan ditangani bersama.

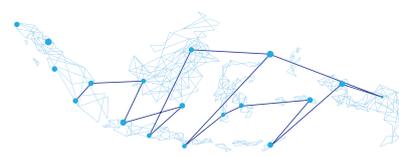
Dari **Grafik 29**<sup>44</sup> tergambar semesta pendukung riset. Dukungan riset bisa berasal

41 *Ibid.*

42 Wawancara dengan Corporate Communication Manager PT Indofood Sukses Makmur.

43 Philanthropy Learning Forum, Jakarta, 28 Januari 2016.

44 Diolah dari (Primahendra dkk. 2003).



**Grafik 28: Pola Dukungan untuk Riset Lembaga Filantropi Berbasis Keagamaan**



Sumber: diolah dari wawancara dengan lembaga filantropi keagamaan

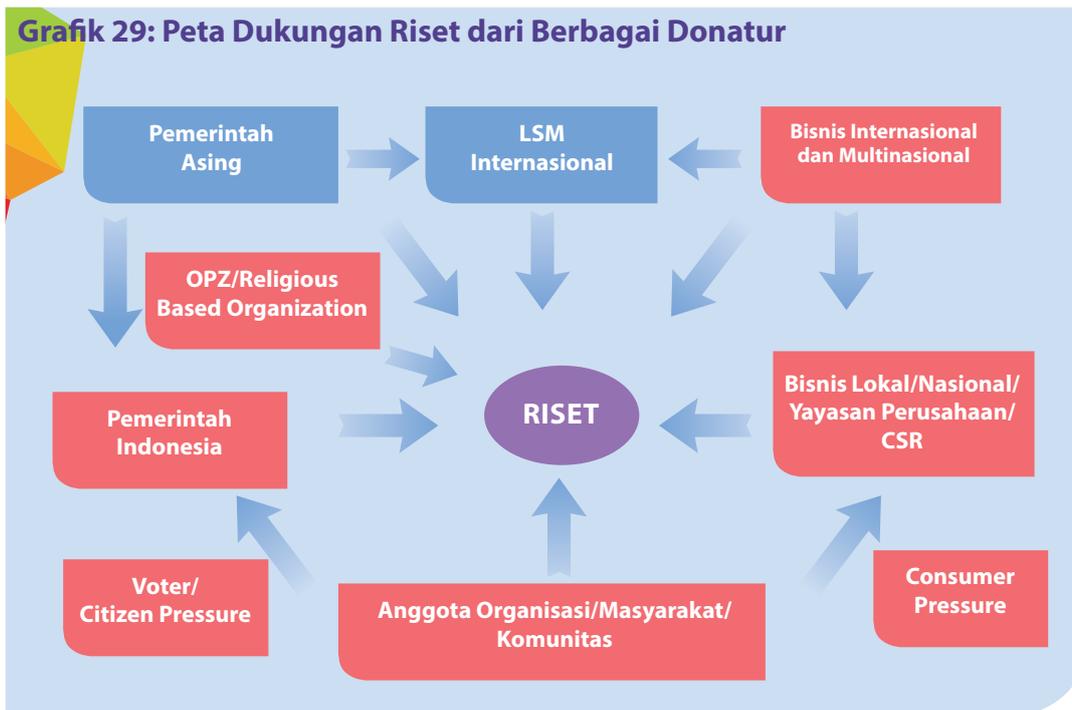
dari pemerintah, baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah asing. Dukungan juga diberikan oleh sektor bisnis, dari yayasan perusahaan dan CSR atau bisnis multinasional dan internasional. Riset juga didukung oleh lembaga intermediari yang berbasis keagamaan maupun independen, donor internasional, dan masyarakat.

Hampir semua lembaga yang menjadi narasumber penelitian ini sepakat bahwa riset harus menjadi pijakan bagi pelaksanaan program atau pembuatan kebijakan. Kondisi riset di Indonesia juga semakin membaik karena akses informasi kian terbuka, sehingga

sumber informasi untuk kebutuhan riset relatif mudah didapatkan.<sup>45</sup>

Peluang dukungan untuk riset ini tidak hanya dari segi pendanaan. Yayasan Institute Danone Indonesia, misalnya, memberikan dukungan sejak prariset hingga pascariset. Prariset mencakup asistensi desain riset, pengambilan data, dan pendampingan. Pascariset dalam bentuk publikasi hasil riset berupa diseminasi sampai pencetakan. Yayasan Institute Danone Indonesia juga membiayai perjalanan untuk pengambilan data dan untuk diseminasi.

**Grafik 29: Peta Dukungan Riset dari Berbagai Donatur**



45 FGD di Hotel Ibis Arcadia, Jakarta, 19 Mei 2016.

## B. Tantangan dan Hambatan Filantropi Riset

Sebagai negara yang memiliki alam dan sumber daya manusia yang melimpah, Indonesia membutuhkan inovasi dengan basis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menggerakkan sektor-sektor strategis dalam perekonomian dan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar global. Lembaga riset di Indonesia ada di berbagai sektor. Dukungan dunia filantropi terhadap riset pun makin berkembang. Namun, kondisi ini tidak mampu mendongkrak eksistensi dunia riset Indonesia di mata dunia. Pertanyaannya, mengapa hal tersebut bisa terjadi?

Studi ini mencatat hambatan dan tantangan riset di Indonesia. Studi juga akan menjabarkan kendala dan tantangan yang dihadapi lembaga filantropi pendukung riset dan lembaga riset. Dengan demikian, dapat dilihat gambaran dari mata penyalur dukungan riset.

**Pertama, pembiayaan riset.** Lembaga filantropi pendukung riset dan lembaga riset mengamini bahwa penelitian membutuhkan biaya besar dan tidak ada penyedia sumber daya yang tidak terbatas. Pengeluaran yang besar ini tidak untuk pelaksanaan riset, tapi untuk biaya perawatan fasilitas penunjang riset, terutama riset ilmu-ilmu alam, dan biaya publikasi riset untuk dimuat di jurnal Internasional. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan pihak Lab Fisika Universitas Indonesia, yang mengatakan bahwa banyak peralatan penelitian sudah tidak layak pakai, sehingga mereka harus meminjam peralatan dari fasilitas rumah sakit dengan biaya yang tidak murah.<sup>46</sup> Menurut perwakilan Lab Fisika Universitas Indonesia, hal ini berdampak pada kebijakan dalam menggalakkan penelitian dan publikasi ilmiah oleh Dikti. Pemberian dana khusus oleh Dikti tidak sejalan dengan realitas di lapangan yang tidak mengakomodasi biaya untuk menggunakan peralatan penunjang penelitian. Sebagaimana Lab Fisika Universitas Indonesia, CSR Indofood juga menyatakan bahwa biaya riset yang sangat besar merupakan salah satu faktor penghambat bagi

lembaga dalam membuka peluang riset yang lebih luas.<sup>47</sup>

Dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, Indonesia tertinggal jauh dalam publikasi karya ilmiah. Berdasarkan peringkat publikasi ilmiah, SCImago Lab, selama 1996-2003, Indonesia berada di urutan ke-61 dengan jumlah publikasi ilmiah 9.194. Singapura ada di peringkat ke-32 dengan 171.037 publikasi, Malaysia di urutan ke-37 (125.084 publikasi), dan Thailand di peringkat ke-43 (95.060 publikasi).<sup>48</sup> Tantangannya saat ini adalah tidak banyak dukungan filantropi untuk publikasi hasil riset. Dalam wawancara, sebagian besar responden menyatakan belum ada lembaga yang memberikan dukungan dalam publikasi penelitian.

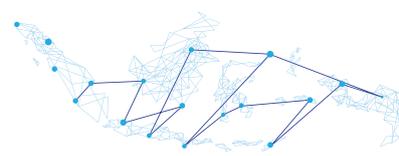
**Kedua, akses informasi.** Sistem yang ada belum memadai dalam menyediakan informasi ketersediaan dana filantropi untuk riset. Lemahnya identifikasi terhadap lembaga filantropi pendukung riset menyebabkan lembaga riset kurang bisa mengakses dana filantropi. Pada poin ini terlihat perbedaan kontras kendala yang dihadapi lembaga filantropi pendukung riset dan lembaga riset. Dalam wawancara dengan Yayasan Unilever, diketahui bahwa yayasan menilai selama ini inovasi riset belum siap diterapkan pada program yang akan dilaksanakan. Di sisi lain, lembaga filantropi seperti Adaro Energy dan Dompot Dhuafa mengungkapkan bahwa dukungan yang diberikan masih merupakan kebutuhan riset perusahaan. Sehingga, dukungan riset harus memiliki manfaat timbal balik bagi perusahaan. Pada hal lain, isu yang dicakup oleh lembaga riset amat luas. Sedangkan isu yang didukung oleh lembaga filantropi masih berkutat pada kepentingan perusahaan. Misalnya, riset sebelum mengimplementasikan program dan riset mengukur efektivitas program yang sudah dijalankan.

**Ketiga, nilai dan pandangan.** Menurut salah satu lembaga yang bisa mengakses informasi penyediaan dukungan riset, ternyata

46 Wawancara dengan Supri.

47 Wawancara dengan Deni Puspahadi.

48 Koran Sindo, 13 April 2015.



syarat mendapat dukungan tersebut tidak serta-merta mudah dipenuhi lembaga riset, terutama yang berbasis LSM. Salah satunya, ada perbedaan fundamental antara nilai lembaga filantropi, khususnya yang berbasis perusahaan, dan nilai-nilai yang dianut organisasi. Hal ini yang menjadi pertimbangan PSHK dalam menolak sejumlah tawaran dari lembaga filantropi.<sup>49</sup> Peluang dukungan alternatif dari sektor privat sebenarnya sudah menghampiri organisasi. Namun, karena ada ketidakselarasan dengan nilai-nilai organisasi, tawaran tersebut akhirnya ditolak.

**Keempat, produktivitas hasil riset rendah.** Di luar kendala yang dihadapi masing-masing pihak, pengembangan riset di Indonesia memiliki tantangan besar, yaitu produktivitas riset yang dihasilkan masih rendah.

**Kelima, kesenjangan informasi terhadap hasil riset.** Hasil publikasi riset yang minim berimplikasi pada tidak terdistribusinya informasi hasil riset. Hal ini perlu diantisipasi agar tidak ada pengulangan topik penelitian dan untuk mencegah plagiarisme.

### C. Insentif dan Disinsentif Filantropi Riset

Menjadikan riset atau penelitian sebagai budaya di ranah pembangunan memotivasi munculnya gagasan cemerlang dan ilmiah, yang kemudian menjadi pengetahuan baru yang aplikatif. Pengembangan riset memiliki peluang dan alternatif baru dengan bantuan lembaga filantropi yang berbasis perusahaan, yayasan keluarga, dan intermediari. PIRAC mencatat temuan insentif dan disinsentif dalam riset ini. Sehingga, dukungan dari sektor ini dapat berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia.

#### 1. Insentif

##### a. Filantropi Riset

Ada anggapan bahwa dunia penelitian adalah jalan sunyi. Tidak banyak orang yang mengapresiasi kerja-kerja riset. Ini berbeda dengan dunia politik yang banyak mendapatkan sorotan. Iklim

untuk riset belum kondusif. Banyak keluhan soal kurangnya apresiasi terhadap peneliti dan lembaga penelitian. Misalnya, kurangnya anggaran, tak adanya dukungan kebijakan, hingga tidak adanya penghargaan.<sup>50</sup>

Untuk menciptakan iklim riset yang kondusif, dibutuhkan dukungan besar dari pemerintah. Pada poin ini, pemerintah dapat memberikan insentif bagi para lembaga filantropi yang mendukung riset.

**Pertama,** bagi lembaga filantropi, apresiasi terhadap dukungan mereka dapat diberikan melalui keringanan pajak bagi program riset. Pemerintah dapat membuat regulasi mengenai *tax deductible*, yaitu dengan mengurangi pajak penghasilan bagi mereka yang mendukung riset.

**Kedua,** lembaga filantropi perlu diberi pengakuan dengan mengimplementasi-

*Profesi peneliti Indonesia belum mendapatkan penghargaan yang setimpal. Di sini kita struggling untuk menjaga kredibilitas karena berkompetisi dengan lembaga riset internasional. Tiap tahun mereka selalu mencari orang bagus yang di lembaga-lembaga penelitian lokal. Tiap tahun kami selalu kehilangan tenaga-tenaga yang baik karena direkrut oleh lembaga-lembaga yang memberikan insentif lebih besar. Mereka menawarkan gaji 4-5 kali lipat. Hanya orang-orang yang benar-benar memiliki komitmen yang akan bertahan.*

*Asep Suryahadi, Direktur SMERU*

kan hasil riset dan mengembangkan hasil riset tersebut. Insentif lainnya dapat berupa pendanaan, atau bahkan kolaborasi program antarlembaga filantropi atau lembaga filantropi dengan pemerintah.

**Ketiga,** insentif lain yang dapat diberikan adalah kemudahan dalam izin

49 Wawancara dengan M. Nur Sholikin.

50 Wawancara dengan Sudaryatmo.

usaha atau lembaga. Berdasarkan temuan studi ini, bantuan dukungan riset cukup banyak dilakukan oleh sektor privat melalui bantuan yayasan perusahaan atau CSR perusahaan. Sehingga, perlu ada apresiasi bagi swasta dengan memberikan penghargaan yang berhubungan dengan bidang usahanya. Selain izin, penghargaan berupa rekomendasi usaha bisa menjadi salah satu poin insentif.

#### **b. Lembaga Riset**

Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah, bisa menyediakan dana yang bisa oleh akademisi, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil yang selama ini melakukan kegiatan riset. Pemerintah juga bisa mengeluarkan kebijakan yang mendukung tumbuhnya riset di sektor masyarakat sipil seperti pemberian penghargaan. Jika di sektor lingkungan ada Kalpataru, di sektor riset pun mestinya ada penghargaan bagi penemuan-penemuan *genuin*. Regulasi yang bisa dibuat, antara lain, semua kebijakandan pelaksanaan pembangunan harus berdasarkan riset. Hasilnyaharus dievaluasi melalui penelitian agar bisa dilihat efektivitas dan relevansinya. Aturan ini akan menumbuhkan tradisi riset di semua sektor.

Regulasi lainnya yang bisa menjadi insentif adalah aturan mengenai sistem pendokumentasian hasil riset dan membuka kesempatan yang luas bagi kalangan LSM dalam melakukan riset untuk pemerintah. Sehingga, riset untuk memenuhi kebutuhan pemerintah tidak didominasi kalangan akademisi. LSM yang memiliki pengalaman dan rutin melakukan riset bisa memperoleh sertifikasi kompetensi yang sama dengan akademik.

Hak intelektual dalam riset juga penting untuk diatur. Siapa pun pelaku risetnya, pemerintah harus mendapatkan

kepemilikan terhadap hasil riset, sehingga hasil risetnya itu tidak dimanfaatkan semata-mata oleh pihak pemberi dana. Perlu dipertimbangkan juga keterlibatan tenaga dalam negeri dalam riset yang didanai oleh lembaga internasional. Meskipun peneliti utamanya berasal dari luar, perlu ada kolaborasi dengan peneliti Indonesia sehingga ada transfer ilmu pengetahuan.

Di perusahaan, tradisi riset didorong oleh kebutuhan finansial lembaga. Salah satu syarat mengajukan pinjaman ke bank untuk pengembangan usaha harus menyertakan data hasil riset pengembangan usaha lembaga.

## **2. Disinsentif**

### **a. Filantropi Riset**

Disinsentif yang paling dirasakan oleh filantropi pendukung riset adalah belum adanya penghargaan berupa pengakuan dan dukungan atas kontribusi sektor filantropi. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya regulasi yang memayungi kerja filantropi di dunia riset. Implikasinya, hingga saat ini pemerintah belum memberikan rumusan insentif yang dapat diakses oleh lembaga filantropi.

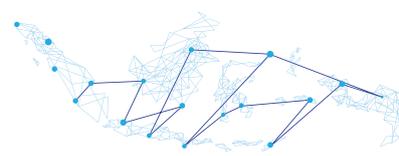
Di sisi lain, belum ada sistem informasi yang memadai perihal ketersediaan dana filantropi untuk pendanaan riset. Ini menyebabkan kerja sama lembaga filantropi dengan lembaga riset belum terjalin optimal. Lembaga riset pun akhirnya kesulitan mengakses dana filantropi. Berdasarkan temuan penelitian ini, bantuan riset lembaga filantropi belum dapat dimonitor keberlangsungannya.<sup>51</sup>

### **b. Lembaga Riset**

Disinsentif lembaga riset yang ditemukan dalam studi ini di antaranya:

***Pertama, isu humaniora kurang mendapat perhatian.*** Isu-isu yang didukung oleh lembaga filantropi masih seputar ilmu alam dan ilmu terapan. Isu

<sup>51</sup> FGD di Hotel Ibis Arcadia, Jakarta, 19 Mei 2016.



*Isu-isu terkait dengan riset humaniora masih terpinggirkan dan dianggap tidak penting. Sehingga, sulit untuk mendapatkan pendanaan, terutama dari sektor filantropi.*

*Sudaryatmo, pengurus harian YLKI*

humaniora dan persoalan masyarakat yang penting diadvokasikan kurang mendapat perhatian. Akibatnya, lembaga riset yang berkiprah di bidang humaniora sulit untuk mengakses dana riset. Padahal, banyak lembaga riset berbasis LSM yang menggunakan riset sebagai basis untuk mengadvokasi masyarakat.

**Kedua, izin etik.** Pemerintah mensyaratkan adanya izin etik pada saat pengambilan data di lapangan. Sering kali izin ini menjadi disintensif karena sangat birokratis, memakan waktu yang lama, serta menuntut biaya yang tidak jelas. Pemerintah pun tidak transparan mengelola dana perizinan tersebut. Hal yang perlu diatur mengenai izin etik ini adalah privasi orang lain, kemanfaatan riset bagi masyarakat, hingga kepastian pengurusan izin riset, bukan pengurusan izin penelitian yang rumit.<sup>52</sup>

**Ketiga, pola pikir masyarakat.** Saat mengambil data di lapangan, lembaga riset biasa memberikan imbalan finansial atau bentuk lain kepada masyarakat yang menjadi responden atau narasumber riset. Hal ini berimplikasi pada terciptanya pola pikir di masyarakat untuk membanding-bandingkan lembaga riset atas imbalan yang diberikan dan lalu menegosiasikan imbalan tersebut.

**Keempat, tidak adanya pengakuan terhadap riset yang dilakukan LSM.** Ukuran riset diakui keilmiahannya secara akademis. Riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi memiliki

keabsahan akademik, namun tidak demikian bagi LSM. Sering kali untuk mendapatkan legitimasi akademik, LSM harus menggandeng pihak kampus. Padahal, kualitas akademik bisa dilihat dari metodologi riset, penentuan sampel, hingga cara analisisnya. Kurangnya apresiasi pemerintah dan publik terhadap hasil riset menyulitkan LSM untuk bersaing dengan perguruan tinggi dalam hal riset.<sup>53</sup>

52 Wawancara dengan Waila Wisjnu.

53 FGD di Hotel Ibis Arcadia, Jakarta, 19 Mei 2016.



# Penutup

Pengembangan riset di Indonesia masih perlu banyak pembenahan. Salah satu potensi yang mampu mendukung pengembangan riset adalah sektor filantropi atau kedermawanan sosial yang kian penting pada masa yang akan datang. Dukungan riset masih didominasi pendanaan donor internasional. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pendanaan dari swasta, sektor publik, dan terutama dari alokasi korporasi menduduki urutan kedua.

## A. Kesimpulan

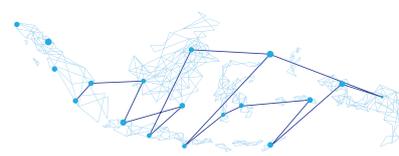
Lembaga penelitian cenderung mengikuti agenda riset dari pemberi dana. Sedangkan lembaga filantropi cenderung melakukan riset sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau lembaga. Di sini ada titik temu antara lembaga riset dan lembaga filantropi untuk saling menyesuaikan diri. Riset-riset yang perlu dikembangkan adalah riset ilmu sosial dan penelitian terapan. Dengan pendanaan yang banyak bersumber dari donor internasional, lembaga riset belum banyak bekerja sama dengan pemerintah dan perusahaan atau yayasan perusahaan. Hal ini karena belum ada titik temu kepentingan antara lembaga riset dengan pemerintah. Untuk kerja sama dengan perusahaan atau yayasan perusahaan,

sejumlah lembaga riset di LSM merasa ada perbedaan nilai antara organisasi dan perusahaan, sehingga kerja sama keduanya sulit terwujud.

Peluang dukungan riset ada di filantropi perusahaan, yayasan keluarga, dan organisasi intermediari. Peluang ini bisa diakses melalui *call for proposal*, penunjukan langsung, hingga kompetisi. Sedangkan, isu dan tema riset yang banyak diminati adalah riset sosial dan ekonomi dengan wilayah penelitian nasional.

Waktu pengajuan dana riset ke lembaga filantropi sepanjang tahun. Sejumlah responden menyebutkan waktu yang ideal adalah April sampai Juni, sehingga masih ada waktu untuk proses seleksi dan negosiasi. Kemudian, pada bulan Januari tahun berikutnya kegiatan riset sudah dapat dilaksanakan.

Mitra kerja yang kerap mengakses dukungan riset lembaga filantropi adalah perguruan tinggi. Lembaga filantropi menggandeng perguruan tinggi untuk mendapatkan legitimasi akademik dari hasil risetnya. Meskipun lembaga filantropi selalu mengatakan bahwa semua pihak, individu, LSM, hingga lembaga keagamaan, memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan dana, kapasitas dan kapabilitas organisasi menjadi indikator



*Riset yang kita dukung bukan riset murni, melainkan riset seperti baseline study atau assessment yang bertujuan untuk mendapatkan data seakurat mungkin sebelum menjalankan program, dan evaluasi program yang dijalankan. Riset menghasilkan pendekatan program yang strategis sekaligus dampak yang sustainable.*

*(Puni A. Anjungsari, Citi Peka Indonesia)*

penting dalam penilaian kriteria mitra riset.

Ada beberapa faktor pendukung dan penghambat yang ditemukan dalam studi ini. Di antaranya adalah:

### Faktor Pendukung

1. Bagi lembaga filantropi, riset menjadi kebutuhan dasar untuk mengimplementasikan visi-misi lembaga. Riset sudah menjadi tradisi lembaga filantropi sebelum mengimplementasikan program dan menjadi *evidence-based policy* dalam berbagai kebijakan organisasi atau perusahaan. Lembaga filantropi memiliki loyalitas terhadap lembaga riset tertentu yang telah menunjukkan kredibilitas, kapasitas, dan kapabilitas dalam melaksanakan riset. Apabila membutuhkan tenaga riset, lembaga filantropi cenderung akan menghubungi lembaga riset yang pernah bekerja sama dengan hasil yang memuaskan. Sebab itu, penting bagi lembaga riset untuk menjaga kualitas hasil riset.

### Faktor Penghambat

1. Belum ada aturan mengenai *reward* atau penghargaan bagi lembaga filantropi pendukung riset. Sebab itu, lembaga

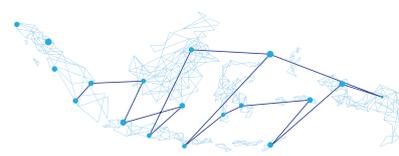
filantropi lebih banyak memberikan dukungan riset untuk kepentingan lembaganya ketimbang untuk menyokong riset itu sendiri. Tidak banyak penghargaan atau pendanaan yang diberikan oleh pemerintah untuk peneliti dan lembaga penelitian. Riset yang dilakukan oleh LSM juga kurang didukung pemerintah sehingga sulit berkembang dan mendapat pengakuan akademik.

2. Subjektivitas lembaga filantropi terhadap pemilihan mitra akan menghambat mitra untuk berkolaborasi. Lembaga filantropi cenderung bekerja sama dengan lembaga riset yang profesional atau telah memiliki nama besar, dan lembaga yang pernah diajak bekerja sama sebelumnya. Hal ini dapat menghambat lembaga riset baru yang sedang tumbuh dan membutuhkan dukungan pihak lain untuk berkembang. Belum banyak sinergi dan berbagi informasi riset antara lembaga riset pemerintah, LSM, lembaga riset komersial, perguruan tinggi, dan perusahaan atau yayasan perusahaan. Sehingga, sering kali ada duplikasi topik hingga isi riset karena hasil dan aktivitas riset tidak diketahui publik.
3. Lembaga filantropi, terutama yayasan perusahaan, lebih tertarik bekerja sama dengan lembaga riset profesional. LSM masih mendapatkan stigma tidak profesional karena sifatnya yang nonprofít dan mengusung nilai kesukarelaan.

### B. Rekomendasi

Sejumlah tindak lanjut atas persoalan yang muncul dari studi ini disusun sebagai rekomendasi untuk pemangku kepentingan seperti pemerintah, lembaga filantropi, dan lembaga riset.

Rekomendasi	Bagi Lembaga Filantropi	Bagi Lembaga Riset	Bagi Pemerintah
<b>Jangka Pendek</b>	Menjadikan riset sebagai <i>evidence-based policy</i> dan bersinergi dengan LSM dan lembaga riset lain dalam melaksanakan penelitian.	Perlu asosiasi riset dan lembaga riset LSM untuk melakukan kurasi riset dari kalangan nonakademisi.	Pemerintah harus membuat regulasi mengenai pemberian insentif bagi lembaga filantropi pendukung riset.
	Lebih terbuka dalam menginformasikan skema penelitian yang didukung, sehingga dapat diakses oleh lembaga masyarakat sipil.	Pembuatan portal khusus riset di Indonesia yang dapat diakses seluruh pelaku pendukung riset, yakni lembaga pelaksana riset, pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan pelaku filantropi.	
	Membuat sistem informasi dana filantropi untuk pendanaan riset yang mudah diakses oleh publik.		
<b>Jangka Menengah</b>	Filantropi berupa CSR perusahaan didorong untuk melakukan riset sebelum menjalankan program pertanggungjawaban pada masyarakat di sekitar perusahaan, sehingga program tersebut dapat tepat guna.	Perlu dikembangkan indeks kemajuan riset (semacam Index/Scopus) yang menetapkan standar kelayakan riset di kalangan LSM.	Mendukung lembaga filantropi mendapat insentif pengurangan pajak.
	Meningkatkan jumlah anggaran riset dan skema riset yang dapat diakses oleh lembaga.	Pembuatan jurnal pengembangan riset yang terbit secara berkala. Mengembangkan kualitas SDM pendukung riset agar memenuhi kelayakan yang diharapkan lembaga filantropi.	
<b>Jangka Panjang</b>	Jasa akuntan publik diperlukan untuk mengaudit lembaga filantropi dalam negeri.	Perlu ada audit keuangan lembaga riset untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga riset.	Pemerintah harus memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat sipil untuk mendapatkan dukungan pendanaan riset.
	Perlu ada bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga donor internasional untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan program.		



# Daftar Pustaka

- Anand, Prapti Upadhyay. 2014. *Levers For Change; Philanthropy in Select South East Asian Countries*. Singapore: Lien Centre for Social Innovation Singapore Management University.
- Anderson, Benedict. 2002. *Hantu Komparasi Nasionalisme, Asia Tenggara, dan Dunia*. Yogyakarta: Qalam.
- CNN Indonesia. 6 Agustus 2015. *Menristek Target Tambah Rp 12 Triliun untuk Anggaran Riset*. Diakses pada 12 Februari 2016 dari <http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150805172446-199-70287/menristek-target-tambah-rp-12-triliun-untuk-anggaran-riset/>
- Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. *Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi*. Edisi X Tahun 2016.
- Evers, Hans-Dieter. 2003. "Transition Towards a Knowledge Society: Malaysia and Indonesia in Comparative Perspective". *Comparative Sociology Volume 2 (2)* page 355-373.
- Gall, M.D., Gall, Joyce, P., and Borg, Walter R. 2007. *Educational Research: An Introduction (8th Edition)*. New Jersey: Pearson Education.
- Gay, L.R. 1991. *Educational Evaluation and Measurement: Competencies for Analysis and Application (2nd Edition)*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Guggenheim, Scott. 2012. "Indonesia's Quiet Springtime: Knowledge, Policy and Reform," in Reid, Anthony (ed.) *Indonesia Rising: The Repositioning of Asia's Third Giant*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Hadiz, V.R dan Dhakidae, Daniel. 2005. *Social Science and Power in Indonesia*. Singapore: Equinox Publishing.
- Hiqmah, Nor. 2016. *Karakteristik & Dinamika Yayasan Perusahaan di Indonesia*. Jakarta: Perhimpunan Filantropi Indonesia.
- Kompas. 11 November 2009. *Eddie, Memperkuat Mata Rantai Persatuan*. Diakses pada 8 Mei 2016 dari <http://nasional.kompas.com/read/2009/11/11/02395429/about.html>
- Kompas. 21 Januari 2016. *Menggugat Anggaran Riset (Opini oleh Asvi Warman Adam)*. Diakses dari <http://print.kompas.com/baca/opini/artikel/2016/01/21/Menggugat-Anggaran-Riset>
- Koran Sindo. 13 April 2015. *Rangking Publikasi Ilmiah Internasional Indonesia (Opini oleh Nanang Bagus Subekti)*. Diakses pada 27 Mei 2016 dari <https://nasional.sindonews.com/read/988644/162/rangking-publikasi-ilmiah-internasional-indonesia-1428903924>
- LIPI. 30 Juni 2012. *Riset dan Daya Saing Bangsa (Opini oleh Hari Susanto)*. Diakses pada 12 Februari 2016 dari <http://lipi.go.id/berita/single/Riset-dan-Daya-Saing-Bangsa/7264>
- Lafer, Inês Mindlin. "Family Philanthropy In Brazil". *Sur Journal* V.12 N. 21 Aug. 2015.
- Latief, Hilman. 2013. *Politik Filantropi Islam di Indonesia. Negara, Pasar dan Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: Ombak.

- Parmar, Inderjeet. 2012. *Foundations of the American Century: The Ford, Carnegie, and Rockefeller Foundations and the Rise of American Power*. Columbia: Columbia University Press.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Diakses dari <http://www.menlh.go.id/DATA/PP-Nomor-27-Tahun-2012.pdf>
- PIRAC dan Dompot Dhuafa. 2015. *Tren Filantropi Perusahaan di Indonesia 2014*.
- PIRAC. 2016. *Proposal Riset Kajian Diagnostik Lembaga Filantropi Pendukung Riset di Indonesia*.
- Primahendra, Reza., Nggao, Ferdy Santoso., Martono, Malakias. 2013. *Kemiskinan dan Kemandirian: Catatan Perjalanan & Refleksi Bina Swadaya*. Jakarta: Yayasan Bina Swadaya.
- Rakhmani, Inaya dan Siregar, Fajri. 2016. "Reforming Research In Indonesia: Policies And Practice". *Global Development Network Working Paper Series No. 92*.
- Reid, Anthony. 2011. "Indonesia dan Dunia Sesudah 66 Tahun," dalam *Tempo 14-20 November 2011 halaman 94-95*.
- Republika. 28 Desember 2015. *Menuju Lembaga Riset Kelas Dunia (Opini oleh Agung Pambudji)*. Diakses pada 12 Februari 2016 dari <http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/15/12/28/o023g76-menuju-lembaga-riset-kelas-dunia>
- Saidi, Zaim. 2006. *Peluang dan Tantangan Akuntabilitas LSM*. Depok: Piramedia.
- Sherlock, Stephen dan Djani, Lucky. 2015. *Kajian Diagnostik: Perkembangan Terbaru Mengenai Hambatan dalam Lingkungan Pendukung Penyediaan Pengetahuan di Pemerintahan Eksekutif dan Legislatif*. Jakarta: Knowledge Sector Initiative. Tersedia di: <http://www.ksi-indonesia.org/in/news/detail/perkembangan-terbaru-mengenai-hambatan-dalam-lingkungan-pendukung-penyediaan-pengetahuan-di-pemerintahan-eksekutif-dan-legislatif>
- Sukardi. 2003. *Metodologi penelitian pendidikan: kompetensi dan praktiknya*. Yogyakarta: Bumi Aksara.



# Lampiran A: Wawancara dengan Ahli

---

Ayu Anastasia, Peneliti Women Research Institute, 14 April 2016.

---

Waila Wisjnu, Program Health Wellbeing Manager Yayasan Unilever Indonesia, 22 April 2016.

---

Ahsin Aligori, Research and Development Manager Dompot Dhuafa, 25 April 2016.

---

Gufron Solikhin, CSR Manager PT Adaro Energy, 25 April 2016.

---

M. Nur Sholikin, Direktur Eksekutif PSHK, 25 April 2016.

---

Sudaryatmo, Pengurus Harian YLKI, 29 April 2016.

---

Supriyanto Ardjo Prawiro, Laboratorium Fisika Universitas Indonesia, 29 April 2016.

---

Sirojuddin Abbas, Ph.D., Direktur Program SMRC, 29 April 2016.

---

Asep Suryahadi, Direktur SMERU Research Institute, 29 April 2016.

---

Afandi Arifin, Technical Manager Anwar Muhammad Foundation, 4 Mei 2016.

---

Deni Puspohadi, Corporate Communication Manager PT Indofood Sukses Makmur, 11 Mei 2016

---

Fransisca Fitri, Direktur Eksekutif YAPPIKA, 18 Mei 2016.

---

Rizki Pohan, Yayasan Institute Danone Indonesia, 23 Mei 2016.

---

Agus Susanto, Direktur Eksekutif Yayasan Tahija, 24 Mei 2016.

---

Anastasius Wahyuhadi, Komisaris Yayasan Tahija, 24 Mei 2016.

---

Puni A. Anjungsari, Assistant Vice President of Corporate Affairs Citi Indonesia, 24 Mei 2016.

---

Knowledge Sector Initiative (KSI) merupakan komitmen bersama pemerintah Indonesia dan Australia yang bertujuan meningkatkan taraf kehidupan rakyat Indonesia melalui penerapan kebijakan publik yang lebih berkualitas yang menggunakan penelitian, analisis, dan bukti secara lebih baik.

KSI adalah konsorsium yang dipimpin oleh RTI International dan bermitra dengan Australian National University (ANU), Nossal Institute for Global Health, serta Overseas Development Institute (ODI).

